

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditi yang sangat penting bagi perekonomian global dan nasional. Kelapa sawit memiliki kemampuan menghasilkan minyak nabati yang banyak dibutuhkan oleh sektor industri. Sebagai produsen minyak sawit terbesar di dunia, Indonesia mempunyai potensi besar untuk menjual minyak sawit dan inti sawit di dalam negeri dan internasional. Pasar yang berpotensi menyerap komersialisasi minyak sawit (CPO) dan minyak inti sawit (PKO) antara lain industri fraksinasi/pengilangan (khususnya industri minyak nabati), minyak dan lemak khusus (pengganti mentega kakao), margarin/shortening, Termasuk oleokimia, dan sabun mandi, dll. Indonesia menjadi salah satu negara yang memiliki peran strategis dalam industri kelapa sawit dunia. Pada dekade terakhir, minyak sawit atau *Crude Palm Oil* (CPO) merupakan primadona ekspor. Kontribusi Indonesia sekitar 58% dari total produksi CPO dunia serta menjadi eksportir CPO dunia tertinggi (Sulaiman, et al., 2024).

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), salah satu komoditi utama ekspor Indonesia yang memiliki nilai tertinggi pada tahun 2024 adalah kelapa sawit walaupun dibandingkan tahun 2023 terjadi penurunan nilai eksport CPO Indonesia. Di tahun 2024 Minyak kelapa sawit atau CPO memegang peran penting dan memberikan kontribusi signifikan dengan nilai ekspor kedua terbesar, yakni sekitar US\$ 20 miliar atau mencapai 21,60 juta ton (Gunawan, Indra, 2025).

Luas kelapa sawit Indonesia pada tahun 2023 diperkirakan mencapai 16,83 juta hektar. Ini terdiri dari perkebunan rakyat (PR) sebesar 37,37% atau 6,29 juta hektar, perkebunan besar swasta (PBS) sebesar 51,08% atau 8,60 juta hektar, dan perkebunan besar negara (PBN) sebesar 3,24% atau 545,71 ribu hektar. Ada juga luasan yang dikonfirmasi sebesar 8,31% atau 1,40 juta hektar. Minyak sawit perkiraan produksi kelapa sawit Indonesia sebesar 46,99 juta ton pada tahun 2023. Terdapat sembilan provinsi yang berfungsi sebagai pusat produksi kelapa sawit berdasarkan produksi per provinsi dari tahun 2019 hingga 2024, beberapa diantaranya berada di pulau Sulawesi (Sehusman, 2024).

Industri kelapa sawit merupakan sumber devisa yang memiliki peran strategis bagi Indonesia dengan permintaan yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun, di luar pertanian kelapa sawit menghadapi banyak masalah, terutama isu-isu negatif termasuk



gkatan emisi GRK, kehilangan keanekaragaman hayati, masalah kesehatan
n lemak jenuh, dan kampanye negatif khususnya berkaitan dengan isu
(IN, 2024).

Indonesia menghadapi lebih dari 15 jenis hambatan non-tarif terhadap ekspor minyak sawitnya, yang tidak hanya mencakup regulasi diskriminatif di negara tujuan ekspor, tetapi juga kampanye negatif yang merusak citra komoditas tersebut. Mayoritas hambatan ini, termasuk kampanye negatif yang sistematis, berasal dari Uni Eropa pasar ekspor terbesar keempat setelah India, Cina, dan Pakistan. Kelapa sawit Indonesia yang dianggap masih kurang dalam menerapkan prinsip keberlanjutan menjadi salah satu masalah yang selalu diangkat. Di sisi lain, upaya proaktif seperti kampanye positif melalui forum internasional, pameran dagang, dan promosi standar sertifikasi terus digencarkan untuk melawan narasi negatif sekaligus memperluas akses pasar global dengan menegaskan komitmen keberlanjutan minyak sawit Indonesia (Sulaiman, et al., 2024).

Selain upaya yang telah dilakukan pemerintah, salah satu cara efektif menhadapi kampanye negatif yang dapat dilakukan pengusaha kelapa sawit adalah dengan menerapkan standar atau sertifikasi berkelanjutan sebagai , salah satu sertifikasi berkelanjutan yang paling efektif dibandingkan dengan sertifikasi lain adalah RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*). RSPO lebih komprehensif dalam hal standar penerapan *sustainable palm oil* dibandingkan standar lain seperti ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dan MSPO (*Malaysian Sustainable Palm Oil*). RSPO lebih komprehensif dikarenakan dari setiap indikator yang dievaluasi RSPO memiliki indikator yang jelas dan persyaratan yang lebih baik dibandingkan lainnya (Wulandari & Ansori, 2021).

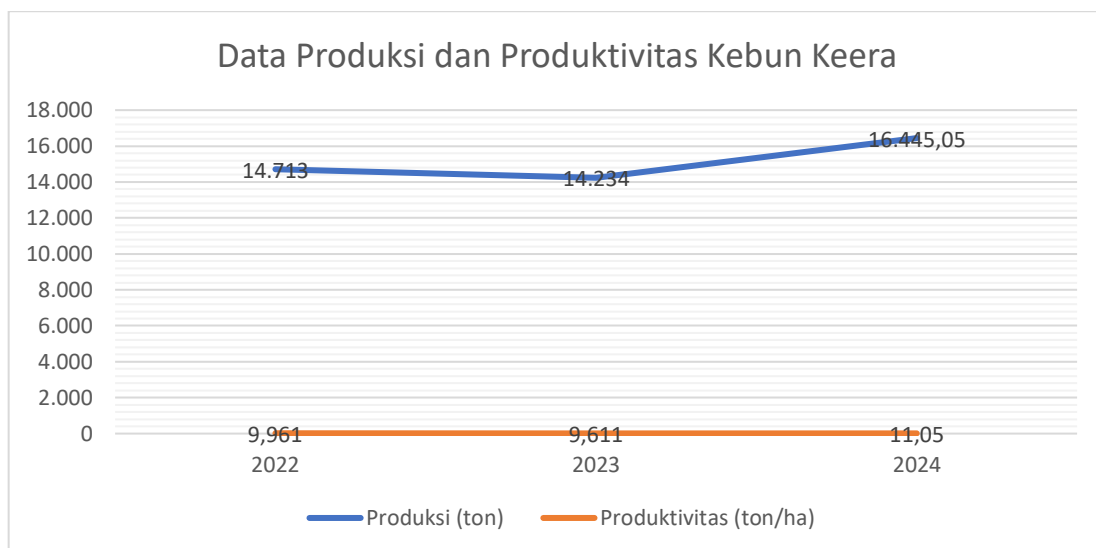
Sertifikasi RSPO selain sebagai standar *Sustainable Palm Oil* yang paling komprehensif, juga dapat menambah produktivitas kebun kelapa sawit, rata-rata produktivitas pekebun bersertifikat RSPO lebih tinggi dari total produktivitas pekebun kelapa sawit konvensional Indonesia 2020. rata-rata produktivitas lembaga pekebun kelapa sawit bersertifikat RSPO adalah 18,32 ton TBS per ha. Sebagai perbandingan, rata-rata produktivitas TBS pekebun kelapa sawit konvensional secara nasional di tahun 2020 hanya 12,82 ton/ha (Ditjenbun, 2022). Jika dibandingkan terdapat tambahan produktivitas sebesar 5,50 ton/ha TBS pada kelompok pekebunan bersertifikasi RSPO. Hal ini menunjukkan bahwa manfaat berlipat bagi peningkatan produktivitas Perkebunan secara berkelanjutan jika menerapkan sertifikasi RSPO.

RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) yang merupakan inisiatif global untuk minyak sawit berkelanjutan yang melibatkan banyak pihak berwenang. Anggota dan peserta RSPO berasal dari banyak negara yang memproduksi atau menggunakan minyak kelapa sawit, termasuk perusahaan perkebunan, pengolah dan pedagang, produsen dan konsumen minyak sawit, lembaga keuangan, LSM lingkungan dan LSM sosial. RSPO adalah sistem sertifikasi global untuk minyak sawit berkelanjutan yang menjamin bahwa anggota RSPO yang memproduksi atau secara fisik menjual produk mereka adalah *Certified Sustainable Palm Oil* (CSPO) atau *Certified Sustainable Palm Oil* (CSPO).



(CSPO) dan *Certified Sustainable Palm Kernel Oil* (CSPKO) telah memperoleh sertifikasi RSPO. Ini juga menjamin bahwa anggota telah berkomitmen dan mematuhi persyaratan keberlanjutan, dan mereka dapat mengajukan klaim atas status sertifikasi mereka dan mengomunikasikannya ke seluruh rantai pasokan. Perlindungan hak-hak pekerja, peningkatan produktivitas, pengurangan kecelakaan kerja, inklusi petani kecil, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan sampah yang lebih baik, pengurangan penggunaan pestisida, peningkatan kepatuhan terhadap peraturan, dan kepercayaan pasar adalah beberapa keuntungan dari sertifikasi RSPO. Penjualan produk bersertifikasi RSPO juga akan memperoleh *premium price* harga lebih tinggi dari pada produk *non certified* RSPO (RSPO, 2025).

Prinsip & Kriteria (P&C) sertifikasi RSPO Versi 2018 (INA Tanggal : 20 April 2020) memiliki 7 Prinsip 42 Kriteria & 180 Indikator, yang diharapkan dari penerapan P&C tersebut dapat berdampak pada 3 aspek utama, yaitu Masyarakat, agar mata pencaharian yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan, HAM dilindungi, dihormati dan dipulihkan; Kesejahteraan, sektor yang kompetitif berkelanjutan dan berkelanjutan; Planet, ekosistem yang Lestari, dilindungi dan ditingkatkan yang bermanfaat bagi kehidupan generasi yang akan datang (RSPO, 2020).



Gambar 1. Data Produksi dan Produktivitas Kebun Keera

Sumber: Laporan Manajemen Kebun Keera

Kebun Keera yang merupakan salah satu kebun kelapa sawit yang berada di provinsi Sulawesi Selatan. Kebun Keera merupakan salah satu kebun kelapa sawit Kerja Sama
 1) Distrik Sulawesi Regional II PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) yang
 2) dalam unit PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV), sebelum terjadi
 kebun Nusantara I (PTPN I) pada Desember 2023. Kebun Keera memiliki
 12.170 Ha dan luas areal yang tertanami sawit sebesar 3.453 Ha di tahun



2025. Produksi dalam 3 tahun terakhir periode 2022 s.d. 2024 relatif naik turun tiap tahunnya. Tahun 2024 produksi Tanda Buah Segar (TBS) Kebun Keera sebesar 16.445,05 ton dengan produktivitas 11,05 ton/ha (Keera, 2024 (Keera-Marolangin K. , 2024).

Menjadi salah satu kebun dibawah operasional PTPN IV yang memiliki Visi Menjadi perusahaan produsen minyak kelapa sawit berkelanjutan terbesar di dunia, yang turut memastikan penghidupan bagi masyarakat dan menciptakan nilai bagi pemegang saham, Visi tersebut menjadi dasar yang kuat pentingnya penerapan *sustainable palm oil* di Kebun Keera. Implementasi sertifikasi RSPO di Kebun Keera akan menjadi parameter keberhasilan komitmen keberlanjutan, namun saat ini salah satu tantangan yang dihadapi di Kebun Keera berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2025 belum tersedianya anggaran khusus terkait pengelolaan berkelanjutan khususnya terkait permasalahan lingkungan. Melihat kondisi tersebut Kebun Keera perlu melakukan sebuah strategi untuk percepatan penerapan *sustainable palm oil* khusus aspek lingkungan (Keera-Marolangin K. , 2025)

Pada standar P&C RSPO aspek terkait lingkungan terdapat pada Prinsip 7, yaitu Melindungi, melestarikan dan meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan hidup. Prinsip 7 ini terdapat 12 Kriteria dan 53 Indikator. *Compliance* terhadap semua Indikator di prinsip 7 RSPO mendakan bahwa Kebun Keera telah *compliance* terhadap aspek lingkungan dalam penerapan *sustainable palm oil*. Tantangan dalam pemenuhan indikator tersebut akan timbul berbagai macam pekerjaan tambahan dan anggaran yang akan dikeluarkan. Kebun Keera perlu menentukan startegi dalam pemenuhan ini, khususnya menentukan prioritas pekerjaan dan alokasi aggaran dalam penerapan RSPO khususnya prinsip 7 dengan mempertimbangkan kondisi di lapangan dan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan latar belakang dan data diatas, maka dapat dilihat pentingnya dilakukan strategi dalam pemenuhan aspek Lingkungan dalam hal ini prinsip 7 Sertfikasi RSPO agar target implementasi aspek lingkungan *sustainable palm oil* dapat terealisasi. Sehingga hal tersebut diatas mendorong peneliti untuk mengambil judul penelitian “**ANALISIS STRATEGI IMPLEMENTASI ASPEK LINGKUNGAN SUSTAINABLE PALM OIL KEBUN KEERA DISTRIK SULAWESI REGIONAL II PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV (PTPN IV)**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dijelaskan sebelumnya maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:



1. Faktor internal yang berpengaruh dalam proses penentuan strategi implementasi dengan *sustainable palm oil* di Kebun Keera saat ini?

2. Faktor eksternal yang berpengaruh dalam proses penentuan strategi implementasi dengan *sustainable palm oil* di Kebun Keera saat ini?

3. Bagaimana analisis SWOT-AHP strategi implementasi aspek lingkungan *sustainable palm oil* di Kebun Keera?
4. Bagaimana strategi implementasi aspek lingkungan *sustainable palm oil* di Kebun Keera yang dapat dilakukan oleh perusahaan?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui faktor internal yang berpengaruh dalam proses penentuan strategi implementasi aspek lingkungan *sustainable palm oil* di Kebun Keera.
2. Untuk mengetahui faktor eksternal yang berpengaruh dalam proses penentuan strategi implementasi aspek lingkungan *sustainable palm oil* di Kebun Keera saat ini.
3. Untuk mengetahui analisis SWOT-AHP strategi implementasi aspek lingkungan *sustainable palm oil* di Kebun Keera.
4. Untuk mengetahui strategi implementasi aspek lingkungan *sustainable palm oil* di Kebun Keera yang dapat dilakukan oleh perusahaan.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi untuk penelitian selanjutnya, khususnya yang berkaitan dengan analisis strategi penerapan sertifikasi atau standarisasi produk yang dapat menjadi opsi strategi pengembangan bisnis perusahaan.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi tambahan dan pertimbangan bagi manajemen perusahaan dalam mengambil keputusan strategi pengembangan bisnis Perusahaan yang berkaitan dengan penerapan sertifikasi atau standarisasi produk.

1.5. Sistematika Penulisan

Penelitian ini disusun berdasarkan pada pedoman Penulisan Tesis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin. Sistematika penulisan tesis ini terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN ; Menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penelisan.



II PUSTAKA : Menguraikan tinjauan teori dan konsep serta tinjauan empiris. Tinjauan teori-teori yang relevan dengan ttopik penelitian. Dalam bab ini juga membahas berbagai sumber penelitian terdahulu sehubungan dengan judul dalam

BAB III KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS : Menguraikan kerangka konseptual dan proses penurunan hipotesis penelitian. Bab ini menjelaskan mekanisme pembentukan hipotesis berdasarkan konsep penurunan logis.

BAB IV METODE PENELITIAN : Menguraikan metode penelitian yang berisi tentang rancangan penelitian, situs dan waktu penelitian, populasi dan sampel dan teknik pengambilan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, variabel penelitian dan definisi operasional, teknik analisis data.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1 *Strategic Planning*

Strategi merupakan proses pengambilan keputusan yang terfokus dan terarah, dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang organisasi. Strategi berperan sebagai panduan bagi pengambilan keputusan, memberikan arah yang jelas dan konsisten dalam jangka panjang, serta menciptakan keunggulan kompetitif melalui pengelolaan sumber daya yang efektif, analisis persaingan, dan identifikasi peluang pasar yang strategis (Riswanto dkk, 2024). Strategi merupakan proses yang bersifat inkremental dan berkelanjutan, yang dirancang untuk mencapai tujuan jangka panjang. Strategi berfokus pada tindakan proaktif yang menentukan hasil masa depan, bukan sekadar reaksi terhadap kejadian masa lalu (Sarumaha, 2024).

Perencanaan merupakan proses yang menghubungkan masa lalu, sekarang, dan masa depan, dengan mempertimbangkan kemungkinan-kemungkinan yang ada. Namun, karena keterbatasan waktu dan sumber daya, perencanaan harus bersifat prioritas dan fokus pada tujuan yang paling penting. Oleh karena itu, perencanaan yang efektif harus memiliki *milestone* yang jelas, sehingga waktu dan sumber daya dapat digunakan secara efisien dan tidak disia-siakan (Sarumaha, 2024).

Strategic planning (perencanaan strategis) merupakan suatu pendekatan manajemen yang sistematis dan terstruktur, digunakan untuk menganalisis kondisi saat ini, mengidentifikasi peluang dan tantangan, serta menyusun rencana aksi yang komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi dalam jangka waktu 5 hingga 10 tahun depan (Sarumaha, 2024).

Menurut Saputra (2021), dalam menyusun perencanaan strategis, organisasi perlu mempersiapkan diri dengan baik melalui beberapa langkah penting. Berikut adalah beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:

1. Organisasi harus berpikir dan belajar secara strategis seperti yang belum pernah dilakukan sebelumnya, sehingga dapat mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada di lingkungan sekitar.
 2. Organisasi harus menerjemahkan strategi yang efektif untuk mengatasi perubahan lingkungan yang dinamis dan tidak pasti, sehingga dapat meningkatkan kemampuan responsif terhadap perubahan.
- Organisasi harus mengembangkan alasan rasional yang kuat untuk meletakkan dasar dan adopsi strategi, sehingga dapat memastikan bahwa strategi yang dipilih sesuai dengan kebutuhan dan tujuan organisasi.



4. Organisasi harus membangun koalisi yang besar dan kuat untuk melaksanakan strategi yang diinginkan, sehingga dapat memperoleh dukungan dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan.
5. Organisasi harus membangun kapasitas yang kuat untuk implementasi, pembelajaran, dan perubahan strategis yang berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan kemampuan organisasi dalam menghadapi tantangan dan mencapai kesuksesan jangka panjang.

Menurut Sarumaha (2024), proses perencanaan strategis mencakup kerangka kerja komprehensif yang memungkinkan organisasi untuk menavigasi lingkungan yang kompleks dan mencapai tujuan mereka. Proses multifaset ini dapat diuraikan menjadi lima langkah penting:

1. Mendefinisikan Misi dan Tujuan Utama Perusahaan: Langkah dasar ini melibatkan pengartikulasian pernyataan misi yang jelas yang mencakup tujuan, nilai, dan visi jangka panjang organisasi. Ini juga memerlukan penetapan tujuan spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu (SMART) yang selaras dengan misi.
2. Menganalisis Lingkungan Kompetitif Eksternal: Langkah ini memerlukan pemeriksaan menyeluruh terhadap lingkungan eksternal organisasi untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman. Analisis ini dapat difasilitasi melalui alat seperti analisis PESTEL (Politik, Ekonomi, Sosial, Teknologi, Lingkungan, dan Hukum), Lima Kekuatan Porter, dan riset pasar.
3. Melakukan Analisis Internal: Langkah ini melibatkan penilaian lingkungan internal organisasi untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Ini dapat dicapai melalui alat seperti analisis SWOT, analisis berbasis sumber daya (RBV), dan benchmarking.
4. Merumuskan Strategi: Berdasarkan wawasan yang diperoleh dari analisis eksternal dan internal, organisasi dapat merumuskan strategi yang memanfaatkan kekuatan, mengurangi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengatasi ancaman. Langkah ini memerlukan pertimbangan hati-hati terhadap berbagai opsi strategis dan pemilihan yang paling tepat.
5. Implementasi dan Evaluasi Strategi: Langkah terakhir melibatkan penerjemahan strategi yang dipilih menjadi rencana aksi dan mengimplementasikannya di seluruh organisasi. Langkah ini juga memerlukan evaluasi dan pemantauan berkelanjutan untuk memastikan bahwa strategi menghasilkan hasil yang diinginkan dan melakukan penyesuaian yang diperlukan.



2.1.2 Produksi Kelapa Sawit dan CPO

Indonesia menempati posisi sebagai produsen utama minyak kelapa sawit di tingkat global. Volume produksi yang dihasilkan dalam sektor ini sebagian besar dialokasikan untuk kebutuhan ekspor ke berbagai negara di dunia, dengan kawasan Asia yang secara konsisten menjadi pasar utama serta mitra dagang strategis dalam distribusi komoditas tersebut (Ulfah et al., 2019).

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis terkemuka dalam subsektor perkebunan yang memiliki peran krusial dalam struktur perekonomian nasional, terutama karena kemampuannya dalam menghasilkan minyak nabati yang sangat esensial bagi berbagai sektor industri. Karakteristik intrinsik minyak sawit—antara lain stabilitas oksidatif yang tinggi pada tekanan tinggi, kemampuan melarutkan senyawa kimia yang tidak dapat dilarutkan oleh pelarut konvensional, serta sifat pelapisan (film-forming) yang unggul—menjadikannya sangat adaptif dan multifungsi untuk diaplikasikan secara luas, baik dalam sektor pangan maupun non-pangan. Dalam industri pangan, minyak sawit berperan sebagai bahan baku utama dalam produksi minyak goreng, shortening, margarin, vanaspati, pengganti lemak kakao, serta berbagai komponen bahan pangan lainnya. Sementara itu, pemanfaatannya di sektor non-pangan mengalami perkembangan yang signifikan dan berkelanjutan, khususnya dalam bentuk minyak industri, turunan oleokimia, biodiesel, serta sebagai bahan dasar dalam pembuatan berbagai produk industri lainnya, termasuk produk farmasi (Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, 2024).

Berdasarkan data sementara yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Perkebunan, total luas areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia pada tahun 2023 mencapai sekitar 16,83 juta hektar. Luasan tersebut terdiri atas areal yang dikelola oleh perkebunan rakyat (PR) sebesar 37,37% atau setara dengan 6,29 juta hektar, perkebunan besar swasta (PBS) sebesar 51,08% atau 8,60 juta hektar, serta perkebunan besar negara (PBN) yang mencakup 3,24% atau 545,71 ribu hektar. Selain itu, terdapat pula luasan areal sebesar 8,31% atau sekitar 1,40 juta hektar yang masih dalam proses verifikasi lebih lanjut. Sementara itu, produksi kelapa sawit nasional pada tahun yang sama tercatat mencapai 46,99 juta ton dalam bentuk minyak sawit, berdasarkan angka sementara. Sebagian besar dari total produksi tersebut dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan ekspor. Tingginya volume ekspor kelapa sawit ini turut mengukuhkan posisi Indonesia sebagai negara pengekspor minyak kelapa sawit terbesar di dunia.

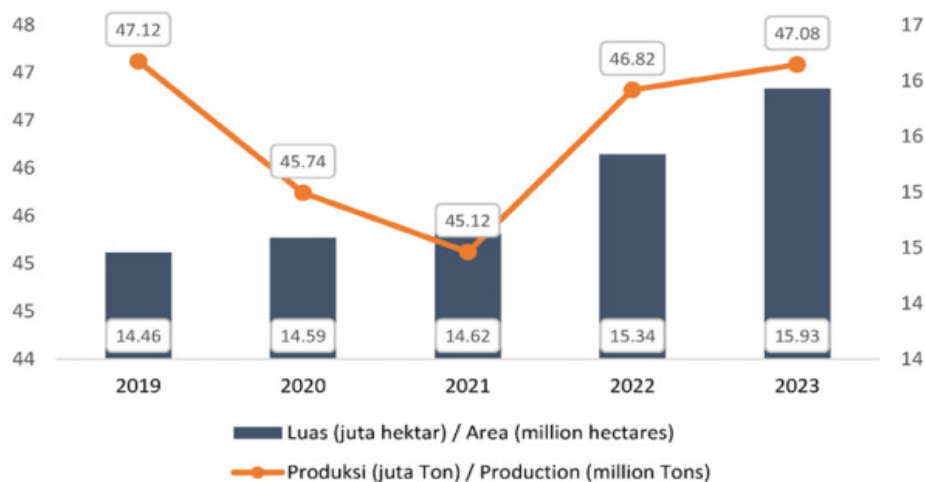
Produksi kelapa sawit dan minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) di Indonesia



Optimized using
trial version
www.balesio.com

tu lima tahun terakhir menunjukkan dinamika yang cukup kompleks dan acuan pada data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) serta Lembaga Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), volume produksi CPO mengalami 45,12 juta ton pada tahun 2021 menjadi 47,08 juta ton pada tahun 2023. Meskipun terjadi peningkatan secara kuantitatif, tren tersebut dinilai kurang

signifikan karena produktivitas per satuan luas lahan menunjukkan kecenderungan stagnasi. Kondisi tersebut terutama disebabkan oleh lambatnya implementasi program peremajaan tanaman kelapa sawit milik petani rakyat, yang pada praktiknya menghadapi berbagai hambatan struktural dan teknis. Salah satu kendala utama adalah permasalahan tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan, yang berdampak pada terhambatnya akses petani terhadap skema pendanaan, termasuk hibah pemerintah yang diperuntukkan bagi kegiatan replanting (Marhaento dkk., 2023).



Gambar 2. Luas Areal dan Produksi Kelapa Sawit Indonesia Tahun 2019-2023

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2023

Sebaran areal perkebunan kelapa sawit di Indonesia mencakup 26 provinsi, meliputi seluruh provinsi di Pulau Sumatera dan Kalimantan, serta beberapa wilayah di Pulau Jawa (Jawa Barat dan Banten), Sulawesi (Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Gorontalo), hingga kawasan timur Indonesia seperti Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Pada tahun 2023, Provinsi Riau tetap menempati posisi sebagai wilayah dengan kontribusi terbesar terhadap total areal perkebunan kelapa sawit nasional, dengan luasan mencapai 3,40 juta hektar atau setara dengan 21,36 persen dari total luas perkebunan kelapa sawit di seluruh Indonesia. Provinsi Riau mampu memproduksi minyak sawit mentah (CPO) sebanyak 9,22 juta ton, menjadikannya sebagai provinsi dengan tingkat produksi tertinggi secara nasional (BPS, 2023),

Perlu dipahami bahwa berdasarkan klasifikasi pengelolaannya, sektor perkebunan



Indonesia secara umum terbagi ke dalam tiga kategori utama, yaitu Perkebunan Negara (PBN), Perkebunan Besar Swasta (PBS), dan Perkebunan Rakyat. Kelompok ini memiliki peranan yang berbeda-beda dalam struktur produksi. Berdasarkan data tahun 2022, proporsi terbesar produksi minyak sawit mentah (Crude Palm Oil) berasal dari Perkebunan Besar Swasta, yang menyumbang sebesar 60,26

persen atau setara dengan 28,21 juta ton. Sementara itu, Perkebunan Rakyat berkontribusi sebesar 34,84 persen atau sekitar 16,31 juta ton, dan Perkebunan Besar Negara memberikan kontribusi paling kecil, yakni 4,90 persen atau 2,30 juta ton. Meskipun terjadi peningkatan volume produksi secara keseluruhan pada tahun 2023, struktur kontribusi berdasarkan status perusahaan tidak menunjukkan perubahan signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Produksi minyak kelapa sawit mentah (CPO) masih didominasi oleh segmen Perkebunan Besar Swasta, yang diperkirakan menyumbang sekitar 28,66 juta metrik ton atau setara dengan 60,88 persen dari total produksi nasional. Selanjutnya, sektor Perkebunan Rakyat mencatatkan kontribusi sebesar kurang lebih 16,22 juta metrik ton atau 34,46 persen, sementara Perkebunan Besar Negara menghasilkan volume produksi yang relatif lebih kecil, yaitu sekitar 2,20 juta metrik ton atau 4,67 persen dari keseluruhan produksi nasional (BPS, 2023).

2.1.3. Sertifikasi RSPO

Sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) merupakan suatu sistem sertifikasi global yang dirancang untuk memastikan produksi dan pengelolaan minyak sawit secara berkelanjutan. Sertifikasi ini memberikan jaminan bahwa para anggota RSPO yang terlibat dalam produksi maupun penanganan fisik Certified Sustainable Palm Oil (CSPO) dan Certified Sustainable Palm Kernel Oil (CSPKO) telah memenuhi standar keberlanjutan yang ditetapkan oleh lembaga tersebut. Dengan demikian, sertifikasi RSPO tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap prinsip dan kriteria keberlanjutan, tetapi juga menjadi legitimasi bagi para pelaku industri untuk mengklaim status keberlanjutan mereka serta mengomunikasikannya secara transparan kepada seluruh mata rantai pasok. Beberapa manfaat utama dari implementasi sertifikasi RSPO mencakup perlindungan terhadap hak-hak tenaga kerja, peningkatan produktivitas usaha perkebunan, pengurangan tingkat kecelakaan kerja, inklusi petani kecil dalam sistem pasar global, penurunan emisi gas rumah kaca, perbaikan dalam sistem pengelolaan limbah, pengurangan penggunaan pestisida secara berlebihan, peningkatan kepatuhan terhadap regulasi nasional maupun internasional, serta peningkatan kepercayaan pasar terhadap produk yang dihasilkan. Selain aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial, produk yang telah tersertifikasi RSPO umumnya memiliki nilai jual yang lebih tinggi (premium price) dibandingkan dengan produk sejenis yang belum tersertifikasi (RSPO, 2020).



Optimized using
trial version
www.balesio.com

ubahan (Theory of Change/ToC) dari Roundtable on Sustainable Palm Oil adalah sebuah peta jalan strategis yang disusun secara cermat untuk merinci visi sistemik dan berurutan yang diperlukan guna mewujudkan visi utama institusionalisasi minyak kelapa sawit berkelanjutan sebagai norma yang berlaku di tingkat industri global. Melalui keterlibatan sinergis dengan berbagai kelompok

anggotanya, mitra strategis, serta beragam pemangku kepentingan terkait, RSPO berkomitmen penuh terhadap pelaksanaan serangkaian strategi dan inisiatif inti yang bersifat komprehensif. Seluruh upaya ini diarahkan untuk mendorong terjadinya transformasi yang mendalam dan menyeluruh di sektor industri kelapa sawit. Dampak yang diharapkan antara lain mencakup percepatan serta perluasan adopsi terhadap standar keberlanjutan RSPO, terbentuknya sistem tata kelola yang lebih transparan dan inklusif, peningkatan signifikan terhadap serapan minyak kelapa sawit berkelanjutan di pasar global, serta terciptanya kondisi yang mendukung secara optimal bagi terwujudnya tujuan jangka panjang RSPO yang bersifat visioner..Secara kumulatif dan progresif, keluaran-keluaran tersebut diharapkan akan berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan petani kelapa sawit, pembentukan industri minyak kelapa sawit yang lebih bertanggung jawab dan berdaya saing, serta pelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam secara berkelanjutan. Tujuan akhirnya adalah menciptakan kondisi ideal di mana produksi kelapa sawit, kelestarian lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat lokal dapat berjalan secara harmonis dan saling mendukung (RSPO, 2020).

Kementerian Pertanian Republik Indonesia (2016), melalui laporan yang berjudul Studi Bersama Persamaan dan Perbedaan Sistem Sertifikasi ISPO dan RSPO, mengemukakan bahwa Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) merupakan entitas internasional yang didirikan pada tahun 2004, yang beroperasi dalam kerangka inisiatif multipemangku kepentingan (multi-stakeholder initiative) yang mengintegrasikan berbagai aktor dalam rantai pasok kelapa sawit. Struktur organisasi ini mencerminkan upaya kolektif untuk mendorong inklusivitas dan tata kelola kolaboratif dalam memajukan praktik kelapa sawit berkelanjutan di tingkat global. Organisasi ini mengadopsi Tujuan Pembangunan Milenium (Millennium Development Goals/MDGs) yang berfokus pada tiga pilar utama keberlanjutan, yaitu people, planet, dan profit (3P), sebagai fondasi dari Prinsip dan Kriteria (Principles & Criteria/P&C) yang diterapkannya.Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) merupakan sebuah inisiatif sukarela berbasis multipemangku kepentingan yang melibatkan aktor-aktor dari berbagai sektor dalam industri kelapa sawit, yang secara sadar dan secara kontraktual berkomitmen untuk mematuhi kerangka sertifikasi RSPO dalam rangka mendorong model produksi dan konsumsi minyak kelapa sawit yang berkelanjutan. Dalam implementasinya, praktik-praktik budidaya yang mengacu pada standar RSPO menekankan pentingnya legalitas lahan, pelestarian integritas ekologis, serta keberlanjutan sistem sosial dan ekonomi dalam jangka

demikian, mandat utama dari pendirian RSPO adalah untuk memfasilitasi pemanfaatan minyak kelapa sawit berkelanjutan melalui penerapan standar yang diakui secara kredibel dan dapat diverifikasi secara independen (Abdul ...).



Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) merupakan sebuah inisiatif global berbasis multi pemangku kepentingan (multi-stakeholder) yang bertujuan untuk mendorong produksi dan konsumsi minyak kelapa sawit secara berkelanjutan. Keanggotaan RSPO mencakup berbagai aktor strategis dari beragam sektor dan negara, termasuk perusahaan perkebunan kelapa sawit, produsen dan peritel produk berbasis sawit, serta organisasi non-pemerintah (LSM) yang bergerak di bidang lingkungan dan sosial, baik dari negara-negara produsen maupun konsumen produk sawit. Tujuan utama dari RSPO adalah untuk mempercepat pertumbuhan dan penggunaan minyak sawit berkelanjutan dengan mengedepankan pendekatan kolaboratif lintas sektor melalui kerja sama dalam rantai pasok serta membangun dialog terbuka antar pemangku kepentingan. Melalui mekanisme ini, RSPO berupaya membentuk ekosistem yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan inklusif dalam tata kelola industri minyak sawit global (RSPO, 2020).

Sertifikasi Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) merupakan suatu sistem verifikasi yang dirancang untuk memastikan bahwa proses produksi minyak kelapa sawit dilaksanakan secara berkelanjutan dan bertanggung jawab. Tujuan utama dari sistem ini adalah memberikan jaminan kepada konsumen bahwa produk-produk berbasis minyak sawit yang mereka konsumsi telah memenuhi seperangkat standar keberlanjutan yang ketat, yang mencakup aspek perlindungan lingkungan hidup, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta peningkatan kesejahteraan sosial bagi komunitas yang terdampak. RSPO sendiri dibentuk pada tahun 2004 sebagai bentuk respons kolektif terhadap meningkatnya keprihatinan global terhadap dampak negatif industri kelapa sawit, khususnya terkait isu-isu seperti deforestasi, degradasi lingkungan, serta pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat lokal dan adat. Melalui mekanisme sertifikasinya, RSPO berupaya mendorong transformasi sektor kelapa sawit ke arah praktik yang lebih lestari dan adil secara sosial (RSPO, 2020).

Menurut data dari (RSPO, 2020), cara yang digunakan RSPO untuk mencapai tujuannya antara lain dengan mengembangkan standar sertifikasi produksi minyak sawit berkelanjutan dan standar sertifikasi untuk pengendalian produk sawit bersertifikat RSPO di dalam rantai pasok adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan ("P&C RSPO") disusun sebagai serangkaian prinsip, kriteria, indikator, dan panduan, serta dirancang untuk digunakan oleh pekebun sawit dan Pabrik Kelapa Sawit ("PKS") dalam melaksanakan praktik produksi berkelanjutan. Interpretasi Nasional dari P&C RSPO digunakan jika telah disahkan oleh Dewan Gubernur RSPO. Jika NI belum audit yang dilakukan harus menggunakan versi terakhir P&C RSPO. P&C dirancang untuk digunakan sebelum, selama, dan setelah lahan dikembangkan tanaman sawit. Prosedur Penanaman Baru (New Planting Procedure/"NPP")



mengatur bagian P&C RSPO yang harus dievaluasi secara mandiri sebelum melakukan penanaman baru.

- b. “Standar Pekebun Swadaya” (Independent Smallholder Standard) RSPO dikembangkan sebagai tanggapan terhadap semakin meningkatnya kesadaran pemangku kepentingan akan perlunya meningkatkan keikutsertaan Pekebun dalam sistem RSPO melalui mekanisme yang mempertimbangkan berbagai tantangan dan situasi yang dihadapi Pekebun secara global sekaligus berbagai hal yang menjadi kebutuhan dan perhatiannya. Standar ini berfungsi sebagai pelengkap atas P&C RSPO 2018 untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan 2018 dan hanya berlaku bagi Pekebun-Pekebun yang memenuhi persyaratan sebagai Pekebun swadaya sebagaimana dijelaskan dalam standar ini.
- c. Standar Sertifikasi Rantai Pasok (Supply Chain Certification/”SCC”) RSPO disusun sebagai serangkaian persyaratan untuk diaudit yang dirancang untuk digunakan oleh organisasi yang ada dalam rantai pasok minyak sawit guna membuktikan adanya sistem pengendalian produk-produk minyak sawit bersertifikat RSPO. Unit bersertifikat rantai pasok dapat membuat klaim terkait penggunaan (atau dukungan terhadap) produk minyak sawit bersertifikat RSPO jika memenuhi persyaratan dalam Standar SCC RSPO. Klaim ini harus mematuhi Aturan RSPO untuk Komunikasi Pasar dan Klaim yang dapat dilihat di situs web RSPO.

Dalam implementasinya, sertifikasi RSPO juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah memastikan bahwa semua pemangku kepentingan, termasuk petani kecil dan perusahaan besar, dapat berpartisipasi dalam proses sertifikasi. Pendekatan yurisdiksional yang diadopsi oleh RSPO mencoba untuk mengatasi masalah ini dengan melibatkan pemerintah dan masyarakat lokal dalam pengembangan kebijakan dan praktik keberlanjutan (RSPO, 2021).

Pendekatan ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh rantai pasokan minyak sawit. Selain itu, pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam proses sertifikasi tidak dapat diabaikan. RSPO telah mengembangkan mekanisme untuk menangani keluhan dan pengaduan dari masyarakat terkait praktik perusahaan yang tidak sesuai dengan standar keberlanjutan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, 2022).

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk RSPO menjadi semakin penting. Secara keseluruhan, sertifikasi RSPO merupakan faktor yang krusial dalam mendorong praktik pertanian kelapa sawit yang berkelanjutan. Standar yang ketat dan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, serta upaya untuk mengurangi dampak negatif dari industri kelapa sawit sekaligus memberikan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal (Mulyadi et al., 2022).



P&C RSPO 2018 menjabarkan definisi Indikator-Indikator untuk masing-masing Kriteria beserta Panduan lebih lanjut jika diperlukan. Indikator adalah bagian spesifik dari bukti obyektif yang akan (harus) dilaksanakan untuk membuktikan atau memverifikasi sudah dipenuhinya Kriteria yang bersangkutan, di mana indikator, bersama-sama dengan Prinsip, Kriteria dan definisi, merupakan bagian normatif dari standar. Sementara Panduan terdiri dari informasi bermanfaat untuk membantu unit sertifikasi dan auditor dalam memahami apa yang dimaksud oleh suatu Kriteria dan/atau Indikator dalam praktiknya, untuk menunjukkan praktik yang baik maupun praktik-praktik yang harus diikuti. Panduan merupakan bagian informatif dari standar (RSPO, 2020).

Struktur P&C RSPO dibagi kedalam tiga wilayah dampak sesuai dengan visi dan teori perubahan, yaitu a. Sasaran dampak Kesejahteraan: Sektor yang kompetitif, berketahanan, dan berkelanjutan (Prinsip 1. Berperilaku etis dan transparan; Prinsip 2. Beroperasi secara legal dan menghormati hak; Prinsip 3. Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif dan ketahanan), b. Sasaran dampak Masyarakat: Mata pencaharian yang berkelanjutan dan pengurangan kemiskinan (Prinsip 4. Menghormati hak Masyarakat dan HAM serta menghasilkan manfaat; Prinsip 5. Mendukung keikutsertaan petani; Prinsip 6. Menghormati hak pekerja dan kondisi kerja), c. Sasaran dampak Planet: Ekosistem yang dilestarikan, dilindungi dan ditingkatkan, sebagai bekal bagi generasi yang akan datang (Prinsip 7. Melindungi, melestarikan dan meningkatkan kualitas ekosistem dan lingkungan hidup) (RSPO, 2020).

Berdasarkan P&C RSPO, 2018 Prinsip 7: Melindungi, Melestarikan dan Meningkatkan Kualitas Ekosistem dan Lingkungan Hidup terdiri atas beberapa kriteria dan indikator, yaitu: Kriteria 7.1

Hama, penyakit, gulma, dan spesies yang diperkenalkan dan bersifat invasif dikelola secara efektif menggunakan teknik Pengelolaan Hama Terpadu ("PHT") dengan sebagaimana semestinya.

- a. **Indikator 7.1.1 (c):** Rencana PHT dilaksanakan dan dipantau untuk memastikan pengendalian hama yang efektif.
- b. **Indikator 7.1.2:** Tidak digunakannya spesies-spesies yang disebutkan dalam Basis Data Spesies Invasif Global dan CABl.org di kawasan yang dikelola, kecuali dilaksanakan rencana untuk mencegah dan memantau penyebarannya.
- c. **Indikator 7.1.3:** Tidak ada penggunaan api untuk pengendalian hama, kecuali dalam keadaan luar biasa, yaitu keadaan di mana tidak ada metode lainnya yang dapat dilakukan, dan dengan persetujuan terlebih dahulu dari otoritas yang berwenang. [Proses akan diatur oleh NI]



Kriteria 7.2

Pestisida digunakan dengan cara yang tidak membahayakan kesehatan pekerja, keluarganya, masyarakat, atau lingkungan.

- a. **Indikator 7.2.1 (c):** Dilukiskan alasan untuk penggunaan semua pestisida. Diprioritaskannya produk dan metode aplikasi selektif, yang spesifik untuk menangani hama, gulma, atau penyakit yang menjadi sasaran.
- b. **Indikator 7.2.2 (c):** Disediakkannya catatan penggunaan pestisida (termasuk di dalamnya bahan aktif yang digunakan dan dosis LD50-nya, luas wilayah yang menggunakan pestisida, jumlah bahan aktif yang diaplikasikan per hektar, dan jumlah aplikasi).
- c. **Indikator 7.2.3 (c):** Sebagai bagian dari rencana, semua penggunaan pestisida diminimalkan, atau jika memungkinkan dihilangkan, sesuai dengan rencana PHT.
- d. **Indikator 7.2.4:** Tidak ada pestisida yang digunakan untuk tujuan profilaksis (pencegahan), kecuali dalam keadaan luar biasa sebagaimana diatur dalam Panduan praktik terbaik nasional.
- e. **Indikator 7.2.5:** Tidak digunakannya pestisida yang masuk dalam daftar World Health Organisation (WHO) Kelas 1A atau 1B atau masuk dalam Konvensi Stockholm atau Rotterdam, serta paraquat, kecuali dalam keadaan luar biasa yang divalidasi oleh proses uji tuntas (*due diligence*) atau jika diizinkan oleh otoritas pemerintah untuk menghadapi keadaan wabah hama.

Uji Tuntas dimaksud mengacu pada:

- a. Penilaian mengenai ancaman, dan verifikasi mengenai alasan dianggapnya ancaman tersebut sebagai ancaman besar.
- b. Alasan tidak adanya alternatif lain yang dapat digunakan.
- c. Proses yang dilakukan untuk memverifikasi alasan tidak adanya alternatif lain yang lebih tidak berbahaya.
- d. Proses untuk membatasi dampak-dampak negatif aplikasi tersebut.
- e. Perkiraan rentang waktu aplikasi tersebut, berikut langkah-langkah yang dilakukan untuk membatasinya untuk mengatasi wabah tertentu yang spesifik.
- f. **Indikator 7.2.6 (c):** Pestisida ditangani, digunakan, atau diaplikasikan hanya oleh orang-orang yang telah menyelesaikan pelatihan yang diperlukan dan selalu diaplikasikan sesuai dengan label produknya. Semua informasi peringatan yang tertera pada produk tersebut diamati, diaplikasikan, dan dipahami sebagaimana oleh pekerja (Lihat Kriteria 3.6). Personil yang mengaplikasikan pestisida menunjukkan bukti adanya pembaharuan berkala terhadap pengetahuan kegiatan yang dilakukannya.



- g. **Indikator 7.2.7 (c):** Penyimpanan semua pestisida sesuai dengan praktik terbaik yang diakui.
- h. **Indikator 7.2.8:** Semua wadah pestisida dibuang dengan sebagaimana mestinya dan/atau ditangani dengan penuh tanggung jawab jika akan digunakan untuk tujuan lain.
- i. **Indikator 7.2.9 (c):** Dilarang untuk melakukan penyemprotan pestisida melalui udara, kecuali dalam keadaan-keadaan luar biasa di mana tidak ada alternatif lainnya yang memenuhi kelayakan untuk dilakukan. Hal demikian membutuhkan persetujuan dari otoritas pemerintah yang berwenang terlebih dahulu. Semua informasi yang sesuai diberikan kepada masyarakat setempat yang terdampak minimal 48 jam sebelum aplikasi penyemprotan melalui udara.
- j. **Indikator 7.2.10 (c):** Dibuktikannya pengawasan medis tahunan spesifik bagi operator pestisida dan tindakan terdokumentasi untuk perawatan kondisi-kondisi kesehatan yang sesuai.
- k. **Indikator 7.2.11 (c):** Tidak ada pekerjaan pestisida yang dilakukan oleh orang-orang yang berusia 18 tahun, wanita hamil/menyusui, atau orang dengan keterbatasan medis, dan mereka ditawarkan alternatif pekerjaan lain yang setara.

Kriteria 7.3

Limbah dikurangi, didaur ulang, digunakan kembali, dan dibuang dengan cara yang bertanggung jawab secara lingkungan dan sosial.

- a. **Indikator 7.3.1:** Didokumentasikan dan dilaksanakannya rencana pengolahan limbah yang mencakup pengurangan, daur ulang, penggunaan kembali, dan pembuangan, dengan berdasarkan kadar racun (toksisitas) dan karakteristik lain yang berbahaya.
- b. **Indikator 7.3.2:** Dibuktikannya pembuangan bahan limbah sebagaimana mestinya sesuai dengan prosedur yang sepenuhnya dipahami oleh pekerja dan manajer.
- c. **Indikator 7.3.3:** Unit sertifikasi tidak menggunakan tempat pembakaran terbuka untuk pembuangan limbah.

Kriteria 7.4

Praktik-praktik dilakukan untuk mempertahankan kesuburan tanah pada, atau jika dapat dilakukan meningkatkan kesuburan tanah hingga, tingkatan yang memastikan didapatkannya hasil panen yang optimal dan berkelanjutan.

- a. **Indikator 7.4.1:** Dilaksanakannya praktik-praktik pertanian yang baik sebagaimana terdapat dalam SOP yang ada, untuk mengelola kesuburan tanah agar mengoptimalkan hasil panen dan meminimalkan dampak pada lingkungan.
- Indikator 7.4.2:** Dilakukannya pengambilan sampel jaringan dan tanah berkala untuk memantau dan mengelola perubahan pada kesuburan tanah dan kesehatan tanaman.



- c. **Indikator 7.4.3:** Berjalannya strategi daur ulang unsur hara yang mencakup daur ulang jangjang kosong, Limbah Cair PKS (*Palm Oil Mill Effluent*/"POME"), dan residu kelapa sawit, serta dimanfaatkannya pupuk non-organik secara optimal.
- d. **Indikator 7.4.4:** Dikelolanya catatan asupan pupuk.

Kriteria 7.5

Praktik-praktik yang meminimalkan dan mengendalikan erosi dan degradasi tanah.

- a. **Indikator 7.5.1 (c):** Tersedianya peta-peta yang mengidentifikasi tanah marginal dan rentan, termasuk lahan berlereng curam.
- b. **Indikator 7.5.2:** Penanaman kembali kelapa sawit secara ekstensif tidak dilakukan di atas lahan berlereng curam.
- c. **Indikator 7.5.3:** Penanaman baru kelapa sawit tidak dilakukan di atas lahan berlereng curam

Kriteria 7.6

Digunakannya survei tanah dan informasi topografis untuk perencanaan lokasi dalam pengembangan penanaman baru, di mana hasilnya digabungkan ke dalam rencana dan operasi yang ada.

- a. **Indikator 7.6.1 (C):** Ditunjukkannya kesesuaian jangka panjang antara lahan dan budi daya kelapa sawit, dan dipertimbangkannya peta tanah atau survei tanah yang mengidentifikasi tanah marginal dan rentan, termasuk di dalamnya lahan berlereng curam, dalam rencana dan operasi yang ada.
- b. **Indikator 7.6.2:** Dihindari penanaman ekstensif di atas tanah marginal dan rentan atau, jika diperlukan, dilakukan sesuai dengan rencana kelola tanah untuk praktik terbaik
- c. **Indikator 7.6.3:** Informasi survei tanah dan topografis menjadi Panduan dalam perencanaan sistem saluran drainase dan irigasi, jalan, dan infrastruktur lainnya.

Kriteria 7.7

Penanaman baru tidak dilakukan di atas gambut terlepas dari kedalamannya, setelah 15 November 2018, dan semua lahan gambut dikelola secara bertanggung jawab.

- a. **Indikator 7.7.1 (C):** Tidak ada penanaman baru yang dilakukan di atas lahan gambut, terlepas dari kedalamannya, setelah tanggal 15 November 2018 di area pengembangan yang ada maupun di area pengembangan yang baru.



7.7.2: Diinventarisasi, didokumentasikan, dan dilaporkan kawasan gambut yang ada dalam kawasan yang dikelola (berlaku efektif mulai tanggal ber 2018) kepada Sekretariat RSPO.

CATATAN PROSEDURAL: Peta dan dokumentasi lainnya untuk lahan gambut disajikan, disusun dan dialih bagikan sesuai dengan Panduan audit Kelompok Kerja RSPO untuk Lahan Gambut (*Peatland Working Group/PLWG*) (lih. Catatan Prosedural untuk Indikator 7.7.5 di bawah ini).

- c. **Indikator 7.7.3 (Q):** Penurunan permukaan tanah (subsistensi) gambut dipantau, didokumentasikan, dan diminimalkan.
- d. **Indikator 7.7.4 (Q):** Berjalannya program yang terdokumentasi untuk pengelolaan air dan tutupan lahan.
- e. **Indikator 7.7.5 (Q):** Dilakukannya kajian drainabilitas untuk lahan perkebunan yang telah ditanami di atas lahan gambut mengikuti Prosedur Penilaian Drainabilitas RSPO, atau cara lain yang diakui RSPO, sekurangnya lima tahun sebelum melakukan penanaman kembali. Hasil penelitian tersebut digunakan untuk menentukan jangka waktu penanaman kembali yang akan dilakukan serta untuk menghilangkan budi daya kelapa sawit secara bertahap sekurangnya 40 tahun atau dua kali siklus, tergantung mana yang lebih lama, sebelum mencapai batas drainabilitas gravitasi alami untuk gambut. Jika kelapa sawit dihilangkan bertahap, komoditas ini digantikan oleh tanaman komoditas lain yang sesuai untuk muka air tanah yang lebih tinggi (paludikultur) atau direhabilitasi dengan vegetasi alami.

CATATAN PROSEDURAL: Informasi lengkap mengenai Panduan Penilaian Drainabilitas RSPO beserta konsep-konsep terkait dan tindakan terperinci ada dalam Panduan yang saat ini tengah disesuaikan/diuji coba oleh Kelompok Kerja RSPO untuk Lahan Gambut (*Peatland Working Group/ PLWG*). Versi akhir harus mendapatkan persetujuan PLWG pada bulan Januari 2019 dan akan mencakup Panduan tambahan tentang langkah-langkah yang harus diikuti setelah memutuskan untuk tidak melakukan penanaman kembali serta konsekuensinya bagi pemangku kepentingan lain, petani, masyarakat setempat, dan unit sertifikasi yang bersangkutan. Direkomendasikan agar periode metodologi uji coba diusulkan untuk diperpanjang selama 12 bulan bagi semua unit manajemen yang terkait (yaitu unit manajemen yang memiliki perkebunan di atas gambut) untuk memanfaatkan metodologi tersebut dan memberikan masukan kepada PLWG agar prosedur yang ada dapat semakin disempurnakan sebagaimana mestinya sebelum bulan Januari 2020. Unit sertifikasi



psi untuk menunda penanaman kembali hingga dikeluarkannya Panduan i atas pedoman tersebut. Panduan tambahan untuk tanaman komoditas dan rehabilitasi vegetasi alami akan diatur oleh PLWG. PLWG dan Grup tani (*Smallholder Interim Group/SHIG*) akan bekerja sama mengembangkan

Panduan untuk Petani Mandiri [acuan silang kepada persoalan SHIG dan Gas Rumah Kaca (GRK)].

- f. **Indikator 7.7.6 (c):** Dikelolanya penanaman yang saat ini masih berjalan di atas lahan gambut sesuai Panduan RSPO untuk Praktik Pengelolaan Terbaik (PPT) untuk budi daya kelapa sawit yang masih berjalan di atas lahan gambut, versi 2 (2018) beserta panduan audit yang terkait.
- g. **Indikator 7.7.7 (c):** Semua kawasan yang tidak ditanami dan lahan gambut pencadangan yang ada di kawasan yang dikelola (terlepas dari kedalamannya) dilindungi sebagai 'kawasan konservasi lahan gambut'; dilarangnya pembuatan saluran drainase baru, bangunan jalan dan jalur listrik baru oleh unit sertifikasi di atas lahan gambut; dikelolanya lahan gambut sesuai dengan 'Praktik Pengelolaan Terbaik RSPO untuk Pengelolaan dan Rehabilitasi Vegetasi Alami terkait dengan Budi Daya Kelapa Sawit di atas Gambut' versi 2 (2018) beserta panduan audit terkait

Kriteria 7.8

Praktik-praktik yang dilakukan untuk menjaga kualitas dan ketersediaan air permukaan dan air tanah dalam.

- a. **Indikator 7.8.1:** Berjalannya rencana kelola air yang dilaksanakan untuk mendukung pemanfaatan sumber air yang efisien dan ketersediaan yang terus menerus, serta menghindari dampak negatif pada pemanfaat lain yang ada di dalam daerah tangkapan air tersebut, Rencana dimaksud memuat hal-hal sebagai berikut.
 - 1) Unit sertifikasi tidak membatasi akses terhadap air bersih atau berkontribusi terhadap pencemaran pada air yang dimanfaatkan masyarakat.
 - 2) Para pekerja memiliki akses memadai untuk mendapatkan air bersih.
- b. **Indikator 7.8.2 (c):** Dilindunginya aliran air dan lahan basah di mana hal ini turut mencakup pemeliharaan dan restorasi zona riparian dan zona penyangga lainnya sesuai dengan Panduan RSPO untuk PPT pengelolaan dan rehabilitasi cagar kawasan sungai/riparian (April 2017).
- c. **Indikator 7.8.3:** Limbah Cair PKS dikelola sesuai peraturan nasional yang berlaku. Kualitas bahan buangan dalam limbah cair PKS khususnya Kebutuhan Oksigen Biokimia (*Biochemical Oxygen Demand/BOD*) dipantau berkala.
- d. **Indikator 7.8.4:** Dipantau dan dicatatnya penggunaan air PKS per ton TBS.

Kriteria 7.9



aan bahan bakar fosil dan peningkatan penggunaan energi terbarukan.

7.9.1: Rencana untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan bahan bakar mengoptimalkan penggunaan energi terbarukan berjalan, dipantau, dan

Kriteria 7.10

Dikembangkan, dilaksanakan, dan dipantaunya rencana-rencana untuk mengurangi polusi dan emisi (termasuk GRK), dan dirancangnya pengembangan baru untuk meminimalkan emisi GRK.

- a. **Indikator 7.10.1 (c):** Emisi GRK unit sertifikasi diidentifikasi dan dinilai. Rencana untuk mengurangi dan meminimalkan emisi GRK dilaksanakan, dipantau via *Palm GHG calculator*, dan dilaporkan secara publik.
- b. **Indikator 7.10.2 (c):** Dimulai dari tahun 2014, dilakukan perkiraan terhadap cadangan karbon pada kawasan pengembangan yang diusulkan beserta potensi sumber emisi dapat terjadi secara langsung sebagai akibat dari pengembangan tersebut, serta rencana untuk meminimalkan emisi tersebut disusun dan dilaksanakan (dengan mengikuti Prosedur Penilaian GRK RSPO untuk Pengembangan Baru).
- c. **Indikator 7.10.3 (c):** Bahan pencemar signifikan lainnya diidentifikasi, dan rencana mengurangi dan meminimalisasi-nya dilaksanakan dan dipantau.

Kriteria 7.11

Api tidak digunakan untuk persiapan lahan dan dicegah di kawasan yang dikelola.

- a. **Indikator 7.11.1 (c):** Lahan untuk penanaman baru atau penanaman kembali tidak dipersiapkan dengan cara dibakar.
- b. **Indikator 7.11.2:** Unit sertifikasi menyusun tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran untuk Kawasan-kawasan yang dikelola secara langsung olehnya.
- c. **Indikator 7.11.3:** Unit sertifikasi melibatkan pemangku kepentingan di lokasi yang bersebelahan dengannya untuk tindakan pencegahan dan pengendalian kebakaran kebakaran.

Kriteria 7.12

Pembukaan lahan tidak menyebabkan deforestasi atau kerusakan pada kawasan yang dipersyaratkan untuk melindungi/meningkatkan kualitas hutan HCV atau HCS. Hutan HCV atau HCS di kawasan dikelola diidentifikasi dan dilindungi/ditingkatkan.

- a. **Indikator 7.12.1 (c):** Pembukaan lahan sejak November 2005 tidak merusak hutan primer atau kawasan yang dipersyaratkan untuk melindungi/meningkatkan HCV. Pembukaan lahan sejak 15 November 2018 tidak merusak hutan yang mengandung HCV/HCS. Dilaksanakannya Analisis Perubahan Pemanfaatan Lahan (*Land Use Change Analysis/LUCA*) historis sebelum pembukaan lahan baru (sesuai Panduan LUCA RSPO).



7.12.2 (c): Kawasan HCV, hutan mengandung HCS, dan kawasan lainnya diidentifikasi dengan ketentuan sebagai berikut:

kebunan yang masih beroperasi, yang memiliki penilaian HCV yang oleh penilai yang disetujui RSPO (*RSPO approved assessor*) dan tidak ada

pembukaan lahan baru yang dilakukan setelah tanggal 15 November 2018, maka penilaian HCV yang ada saat ini untuk perkebunan dimaksud tetap berlaku.

Semua pembukaan lahan baru yang dilakukan (di perkebunan yang masih beroperasi atau penanaman baru) setelah tanggal 15 November 2018 didahului oleh suatu penilaian HCV-HCS yang menggunakan Panduan HCSA dan Panduan Penilaian HCV-HCSA. Ini akan mencakup konsultasi pemangku kepentingan dan memiliki pertimbangan yang lebih luas untuk tingkat lanskap.

CATATAN PROSEDURAL untuk INDIKATOR 7.12.2: Untuk rincian tindakan transisional, lihat Lampiran 5: Transisi RSPO dari penilaian HCV ke penilaian HCV-HCSA

- c. **Indikator 7.12.3 (c):** Pada Lanskap Bertutupan Hutan Tinggi (HFCL) yang ada di Negara Bertutupan Hutan Tinggi (HFCC), akan berlaku prosedur spesifik untuk kasus-kasus terdahulu (*legacy cases*) dan pengembangan oleh masyarakat adat dan masyarakat lokal yang memiliki hak legal atau adat, dengan mempertimbangkan proses-proses penyelesaian para pemangku kepentingan (*multi-stakeholder*) tingkat regional dan nasional. Indikator 7.12.2 berlaku hingga prosedur ini dikembangkan dan disahkan.

CATATAN PROSEDURAL untuk INDIKATOR 7.12.3: Harus ada manfaat bagi masyarakat setempat yang dapat dibuktikan, dan pengakuan yang jelas terhadap lahan legal dan adat berdasarkan perencanaan partisipatif pemanfaatan lahan; pengembangan harus dilakukan secara proporsional mengikuti kebutuhan masyarakat setempat; dengan disertai keseimbangan antara konservasi dan pengembangan. Prosedur ini juga akan mencakup penanaman yang dilakukan di lahan pertanian/perkebunan yang sebelumnya atau yang telah ditinggalkan. Semua persyaratan P&C lainnya berlaku, termasuk di dalamnya persyaratan FPIC dan HCV.

- d. **Indikator 7.12.4 (c):** Jika HCV, hutan HCS setelah tanggal 15 November 2018, lahan gambut, dan kawasan konservasi lainnya telah diidentifikasi, kawasan-kawasan ini dilindungi dan/atau ditingkatkan. Rencana kelola terpadu untuk melindungi dan/atau meningkatkan HCV, hutan HCS, lahan gambut, dan Kawasan konservasi lainnya dikembangkan, dilaksanakan, dan disesuaikan jika dibutuhkan, dan dilengkapi dengan persyaratan-persyaratan pemantauan. Rencana kelola terpadu tersebut ditinjau sekurang-kurangnya sekali setiap lima tahun. Rencana kelola terpadu tersebut



akan melalui konsultasi bersama para pemangku kepentingan terkait dan kawasan yang dikelola langsung beserta semua pertimbangan tingkat lebih luas yang sesuai (jika pertimbangan tersebut telah diidentifikasi).

- e. **Indikator 7.12.5:** Dalam hal telah diidentifikasinya hak-hak masyarakat setempat di Kawasan HCV, hutan HCS setelah tanggal 15 November 2018, lahan gambut, dan kawasan konservasi lainnya, maka tidak ada pengurangan terhadap hak-hak tersebut jika tidak disertai bukti adanya kesepakatan hasil negosiasi yang didapatkan melalui proses FPIC, yang memberi kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat dalam pemeliharaan dan pengelolaan kawasan-kawasan konservasi ini.
- f. **Indikator 7.12.6:** Dilindunginya semua spesies Langka, Terancam, atau Genting (*Rare, Threatened or Endangered/RTE*), baik teridentifikasi dalam penilaian HCV maupun tidak. Terdapat program edukasi berkala untuk tenaga kerja mengenai status spesies RTE. Diberikan tindakan disipliner sesuai aturan perusahaan dan hukum nasional jika pekerja menangkap, menyakiti, menyimpan, memperjualbelikan, memiliki, atau membunuh spesies tersebut.
- g. **Indikator 7.12.7:** Dipantaunya status HCV, hutan HCS (setelah 15 November 2018), ekosistem alami, kawasan konservasi gambut, dan spesies RTE. Hasil dari pemantauan ini dijadikan umpan balik bagi rencana kelola.
- h. **Indikator 7.12.8 (c):** Jika pembukaan lahan tidak didahului penilaian HCV (sebelum November 2005) atau HCV-HCSA (sejak 15 November 2018), berlaku Prosedur Remediasi dan Kompensasi (*Remediation and Compensation Procedure/RaCP*).

2.1.4. SWOT

Analisis SWOT merupakan sebuah instrumen perencanaan strategis yang digunakan untuk membantu organisasi dalam mengidentifikasi serta mengevaluasi secara sistematis faktor-faktor internal, yang mencakup kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*), maupun faktor-faktor eksternal, yang meliputi peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*), yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan (Phadermrod et al., 2019).

Kelemahan merujuk pada berbagai keterbatasan internal yang dapat menghambat kinerja dan daya saing suatu perusahaan, seperti penggunaan teknologi yang sudah usang, keterbatasan dalam hal sumber daya manusia maupun finansial, serta penerapan praktik manajerial yang tidak efektif atau tidak adaptif terhadap dinamika lingkungan usaha. Sementara itu, peluang mengacu pada faktor-faktor eksternal yang dapat dimanfaatkan secara strategis oleh perusahaan untuk meningkatkan posisi kompetitifnya, termasuk di

tren pasar yang menguntungkan, pergeseran perilaku konsumen, inovasi kebijakan pemerintah yang mendukung sektor tertentu. Sebaliknya, ancaman dari kondisi eksternal yang berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap bisnis, seperti meningkatnya intensitas persaingan, perubahan kebijakan merugikan, serta ketidakstabilan ekonomi makro (Purnomo et al., 2020).



Menurut (Lestari & Yunita, 2020), analisis SWOT merupakan suatu kerangka kerja analitis yang bersifat fleksibel dan dapat diterapkan dalam berbagai konteks strategis, baik pada tingkat produk secara individual, unit organisasi tertentu, maupun pada skala industri secara keseluruhan. Fleksibilitas ini memungkinkan metode SWOT untuk disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik dari situasi yang sedang dihadapi. Dalam pelaksanaannya, terdapat sejumlah pendekatan yang dapat digunakan untuk melakukan analisis SWOT, antara lain melalui sesi brainstorming individu, diskusi kelompok terfokus (focus group discussion), maupun melalui penyebaran survei terstruktur. Yang tak kalah penting dalam proses ini adalah keterlibatan pemangku kepentingan yang beragam, yang mencakup tidak hanya aktor internal seperti karyawan, tetapi juga pihak eksternal seperti pelanggan dan pakar independen. Pendekatan partisipatif ini memungkinkan diperolehnya perspektif yang lebih menyeluruh dan komprehensif mengenai posisi strategis organisasi. Dengan demikian, analisis SWOT berfungsi sebagai alat strategis yang sangat berharga bagi organisasi dari berbagai ukuran dan sektor. Melalui pendekatan yang terstruktur dan berbasis data, SWOT dapat membantu organisasi dalam mengevaluasi lingkungan internal dan eksternal secara lebih sistematis, serta dalam merumuskan keputusan strategis yang lebih tepat untuk mencapai tujuan jangka panjang mereka.

Analisa SWOT merupakan alat yang digunakan untuk mengidentifikasi secara sistematis sejumlah faktor yang bertujuan untuk perumusan strategi perusahaan yang bersumber pada logika dan ditujukan untuk dapat memaksimalkan kekuatan (strength) dan meraih peluang (opportunity), namun dapat meminimalkan kelemahan (weakness) dan ancaman (threats) juga secara bersamaan. Pada analisis SWOT ini akan melakukan perbandingan antara faktor luar perusahaan yaitu peluang (Opportunity) dan ancaman (Threats) dengan faktor dalam perusahaan seperti kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness) (Rangkuti, 1997).

David (2009) dalam Fitria (2020) mengemukakan bahwa terdapat alat pencocokan empat macam strategi yang disebut juga matriks SWOT, dimana diantara empat macam strategi tersebut adalah sebagai berikut: Strategi SO (menggabungkan faktor kekuatan dan faktor peluang), Strategi WO (menggabungkan faktor kelemahan dan faktor peluang), Strategi ST (menggabungkan faktor kekuatan dan faktor ancaman), dan terakhir yaitu Strategi WT (menggabungkan faktor kelemahan dan faktor ancaman). Keseluruhan strategi tersebut bertujuan untuk membantu para manajer dalam pengembangan strategi pemasaran. Dengan



pencocokkan faktor-faktor eksternal dan internal menjadi bagian penentuan dalam mengembangkan Matriks SWOT dan membutuhkan penilaian yang netral maupun paduan yang paling benar.

David (2015) dalam Fitria (2020), salah satu tujuan SWOT yakni sebagai dasar dalam melihat suatu permasalahan di perusahaan ditinjau

berdasarkan 4 sisi yang tidak selaras sehingga membantu perusahaan membuka pandangan terhadap internal maupun eksternalnya. Dan hasil analisis SWOT disajikan dalam bentuk rekomendasi untuk menjaga kekuatan dan meningkatkan manfaat dari peluang yang ada, sekaligus mengurangi kekurangan dan menghindari ancaman. Jika Analisa SWOT digunakan dengan bijak dan benar maka akan sangat bermanfaat karena dalam banyak aspek perusahaan yang terabaikan dan tidak terlihat akan terekspos. Oleh karena itu analisa SWOT ini sangat berguna sebagai analisis strategis yang dapat meminimalisir kelemahan perusahaan dan dapat mengurangi akibat dari ancaman yang terjadi. SWOT sebagai matriks metode secara kualitatif yang dikembangkan oleh Kearns memiliki delapan kotak, dua kotak pertama diantaranya adalah faktor eksternal (Peluang dan Tantangan) dan dua kotak sebelah kiri adalah faktor internal (Kekuatan dan Kelemahan). Empat kotak lainnya adalah kotak bermasalah atau faktor strategis yang disebabkan oleh perpotongan faktor internal dan eksternal.

Penjelasan lebih lanjut dikemukakan oleh (Hasbullah et al., 2021) bahwa tujuan dari analisis SWOT adalah untuk membantu perusahaan memahami posisinya saat ini dan mengidentifikasi area potensial untuk perbaikan. Dengan menempatkan kekuatannya, perusahaan dapat fokus memanfaatkannya untuk mencapai tujuannya. Dengan mengenali kelemahannya, perusahaan dapat bekerja untuk mengatasinya dan meningkatkan kinerjanya secara keseluruhan. Dengan mengidentifikasi peluang, perusahaan dapat mengidentifikasi jalan baru untuk pertumbuhan dan ekspansi. Dengan mengenali ancaman, perusahaan dapat mempersiapkan potensi tantangan dan meminimalkan dampaknya.

Menurut David (2009) dalam penelitian Fitria (2020), terdapat empat macam alternatif strategis, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Strategi Strength-Opportunity (SO) Strategi penggabungan dari kekuatan-peluang ini menggunakan keunggulan internal perusahaan untuk memperoleh manfaat peluang eksternal.
2. Strategi Weakness-Opportunity (WO) Pada penggabungan ini bagaimana membenahi titik lemah perusahaan yang mengarah pada tujuan agar bisa menggunakan kesempatan yang ada.
3. Strategi Strength-Threat (ST) Alternatif berikut memanfaatkan kekuatan dalam meminimalisir ancamanyang akan ditemui perusahaan.
4. Strategi Weakness-Threat (WT) Kombinasi ini digunakan untuk mengurangi suatu hal dalam internal melalui menghinari ancaman eksternal.



archy Process (AHP) merupakan suatu metodologi dukungan pengambilan persifat canggih dan berlandaskan teori, yang pertama kali dikembangkan

oleh Thomas L. Saaty. Metode ini dirancang secara khusus untuk menangani persoalan pengambilan keputusan yang kompleks, terutama yang melibatkan keberadaan berbagai kriteria yang saling bertentangan. AHP memfasilitasi proses dekomposisi masalah menjadi struktur hierarkis yang koheren dan logis, sehingga memungkinkan evaluasi sistematis terhadap variabel-variabel baik yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif, serta meningkatkan akurasi dan rasionalitas dalam pengambilan keputusan (Syaifullah, 2010).

Sebagai salah satu instrumen unggulan dalam pendekatan multi-criteria decision making (MCDM), AHP diperkenalkan pada dekade 1970-an guna merasionalisasi proses penilaian subjektif yang melekat dalam pengambilan keputusan manusia. Tujuan utamanya adalah untuk mengkuantifikasi preferensi relatif terhadap alternatif yang tersedia melalui penghitungan bobot prioritas, berdasarkan tingkat pemenuhan kriteria yang ditetapkan oleh pengambil keputusan. Ketelitian metodologis ini memungkinkan integrasi penilaian kualitatif dengan pengukuran kuantitatif dalam suatu sistem prioritas terpadu yang mencerminkan logika pengambilan keputusan yang rasional dan konsisten. Karena kemampuannya dalam mengoperasionalkan struktur preferensi yang kompleks, AHP telah diadopsi secara luas dalam konteks strategis, kebijakan publik, dan alokasi sumber daya lintas disiplin ilmu (Suprpto, 2022).

Menurut penjelasan Saaty (2012) sebagaimana dikemukakan dalam Nurnawati (2024), penerapan metode AHP terdiri atas serangkaian tahapan prosedural yang bertujuan untuk membentuk koherensi keputusan. Tahap pertama melibatkan konstruksi struktur hierarkis, yaitu dengan memecah persoalan utama menjadi elemen-elemen penyusunnya, yang kemudian disusun berdasarkan signifikansi fungsional dan relasional antar elemen tersebut. Struktur hierarki ini umumnya mencakup beberapa tingkat, dimulai dari tujuan utama, kriteria dan sub-kriteria, hingga kepada alternatif yang akan dievaluasi. Selanjutnya, dilakukan proses perbandingan berpasangan antar elemen dalam setiap tingkat hierarki untuk menilai tingkat kepentingan relatifnya. Untuk memfasilitasi proses ini, Saaty memperkenalkan skala numerik absolut mulai dari 1 (sama penting) hingga 9 (sangat jauh lebih penting), yang digunakan untuk mentransformasikan penilaian subjektif menjadi nilai-nilai rasio. Mekanisme perbandingan berpasangan merupakan inti dari kekuatan analitis metode AHP. Melalui teknik ini, para pengambil keputusan diminta untuk mengevaluasi pasangan elemen berdasarkan atribut tertentu, sehingga memungkinkan pembentukan matriks perbandingan yang bersifat resiprokal. Matriks-matriks tersebut kemudian dinormalisasi, dan dilakukan perhitungan untuk memperoleh vektor prioritas, yang merepresentasikan bobot relatif setiap alternatif. Untuk menjamin konsistensi logika penilaian, indeks konsistensi turut dihitung sebagai indikator sejauh mana preferensi yang diungkapkan bersifat transitif dan tidak trans. (Syaifullah & Talluri, 2004 dalam Dwi, 2009).



Kerangka kerja AHP memiliki keunggulan utama dalam kemampuannya menyintesis data kualitatif dan kuantitatif ke dalam satu model keputusan yang terpadu. Dikembangkan di University of Pittsburgh, metodologi ini dikenal akan keanggunan pendekatannya, kemudahan implementasi, serta fleksibilitasnya dalam berbagai konteks pengambilan keputusan. Sebagaimana diungkapkan oleh Mustafa, Jia-Pei, Siaw-Pen, dan Abd Hamid (2005), AHP menyediakan prosedur yang transparan dan dapat direproduksi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan kompleks melalui model hierarki yang terstruktur, evaluasi berbasis perbandingan berpasangan, serta skema prioritas yang berlandaskan kaidah matematika. Pelaksanaan metode AHP secara umum mencakup empat tahapan utama, yakni: pembentukan struktur hierarkis, perbandingan berpasangan, sintesis vektor prioritas, serta pengukuran tingkat konsistensi (Shyjith, Ilangkumaran, & Kumanan, 2008).. Lebih detail, keempat tahapan tersebut dijelaskan di bawah ini:

1. Pembuatan struktur hierarki

Uraikan permasalahan multi kriteria ke dalam bentuk hierarki dengan beberapa elemen konstituen kecil. Gambar 2.3 memperlihatkan contoh bentuk hierarki yang dapat dibuat. Pada gambar tersebut tujuan umum berada pada tevel teratas; kriteria yang digunakan untuk evaluasi diletakkan seluruhnya pada leveltengah dan kandidat alternatif pada level bawah.

2. Perbandingan Berpasangan

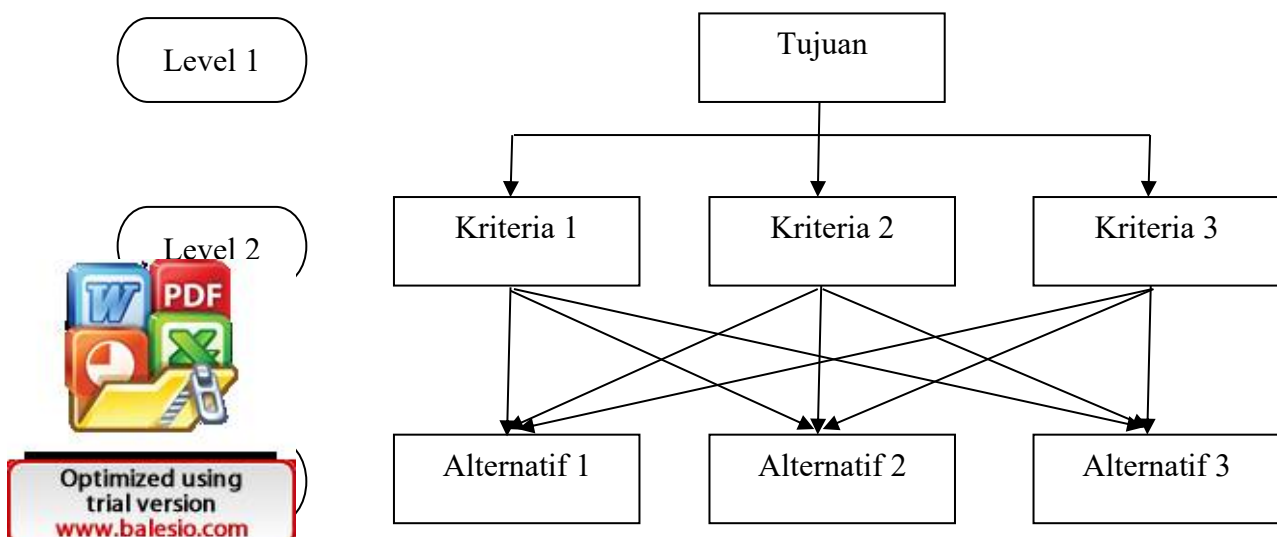
Beberapa perbandingan berpasangan dibuat diantara elemen-elemen pada level yang sama relatif terhadap level yang lebih tinggi menggunakan skala Saaty 1-9 yang terdapat pada tabel 1.

3. Sintesis prioritas

Dapatkan vektor prioritas menggunakan metode eigen vektor pada setiap level berkenaan dengan setiap elemen.

4. Mengukur konsistensi

Baik atau buruknya penilaian dapat dievaluasi menggunakan rasio konsistensi.



Gambar 3. Arsitektur Dasar Hierarki

Sumber: Saaty, 1980

Tabel 1. Skala Perbandingan Berpasangan

Intensitas Kepentingan	Definisi	Penjelasan
1	Kepentingan Sama	Dua elemen memiliki kontribusi yang sama terhadap tujuan
3	Kepentingan <i>Moderate</i>	Salah satu elemen sedikit lebih kuat dibandingkan elemen lainnya
5	Kepentingan Kuat	Salah satu elemen lebih kuat dibandingkan elemen lainnya
7	Kepentingan sangat kuat	Salah satu elemen sangat kuat dibandingkan elemen lainnya
9	Kepentingan ekstrim	Bukti lebih memilih satu elemen dibandingkan elemen lainnya sebagai tingkat afirmasi tertinggi yang mungkin
2,4,6,8	Nilai tengah diantara dua perbandingan yang berdekatan	Kadang-kadang perlu dilakukan interpolasi dari suatu skala penilaian karena tidak ada skala yang tepat untuk menggambarannya
Resiprok nilai di atasnya	Jika aktivitas <i>i</i> memiliki nilai saat dibandingkan dengan aktivitas <i>j</i> , maka aktivitas <i>j</i> akan memiliki nilai resiprok jika dibandingkan dengan terhadap <i>i</i> .	

Saaty (1999), mengemukakan langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan menggunakan AHP. Langkah-langkah tersebut adalah:

1. Mendefinisikan masalah dan menspesifikasikan pemecahan yang diinginkan.
2. Membuat bentuk hierarki dari sudut pandang manajerial secara keseluruhan.
3. Membuat matriks perbandingan berpasangan dari masing-masing elemen terhadap level di atasnya.
4. Mendapatkan semua penilaian untuk melengkapi matriks di langkah 3. Pertimbangan dari banyak orang dapat disatukan dengan memakai rata-rata geometrisnya.



Jika data perbandingan berpasangan diperoleh, maka nilai prioritasnya dan rata-rata dihitung.

Langkah 3, 4, dan 5 untuk semua level dan kelompok dalam hierarki.

7. Menggunakan komposisi hierarki untuk membobotkan vektor prioritas keseluruhan untuk elemen terbawah hierarki.
8. Mengevaluasi konsistensi untuk seluruh hierarki dengan mengalikan setiap indeks konsistensi dengan prioritas kriteria bersangkutan.

Saaty (1999), juga mengemukakan beberapa keunggulan AHP adalah sebagai berikut:

1. Kesatuan
AHP memberikan model tunggal, mudah dimengerti, dan secara fleksibel dapat digunakan pada masalah tak terstruktur dalam lingkup yang luas.
2. Kompleksitas
AHP menyatukan pendekatan deduktif dan sistem untuk memecahkan masalah yang kompleks.
3. Ketergantungan
AHP menyajikan ketergantungan antar elemen tanpa memaksakan pemikiran linier.
4. Struktur hierarki
AHP menggambarkan kecenderungan alamiah dalam mengelompokkan elemen-elemen dalam suatu sistem menjadi level atau tingkatan yang berbeda.
5. Ukuran
AHP menggunakan skala pengukuran satuan tidak dapat diukur (*intangible*) dan metode untuk menetapkan prioritas.
6. Konsistensi
AHP menghitung konsistensi logis penilaian yang digunakan dalam menetapkan prioritas.
7. Sintesis
AHP memberikan estimasi keseluruhan dari kemungkinan pemilihan semua alternatif.
8. *Tradeoffs*
AHP mempertimbangkan prioritas relatif faktor dalam suatu sistem dan memungkinkan dilakukannya pemilihan alternatif terbaik berdasarkan tujuan.
9. Penilaian dan konsensus
AHP tidak berdasarkan konsensus tetapi berdasarkan sintesis hasil penilaian yang beragam.
10. Pengulangan proses
AHP memungkinkan dilakukannya penyempurnaan definisi terhadap masalah dan penilaian dan pemahaman terhadap masalah melalui repetisi.

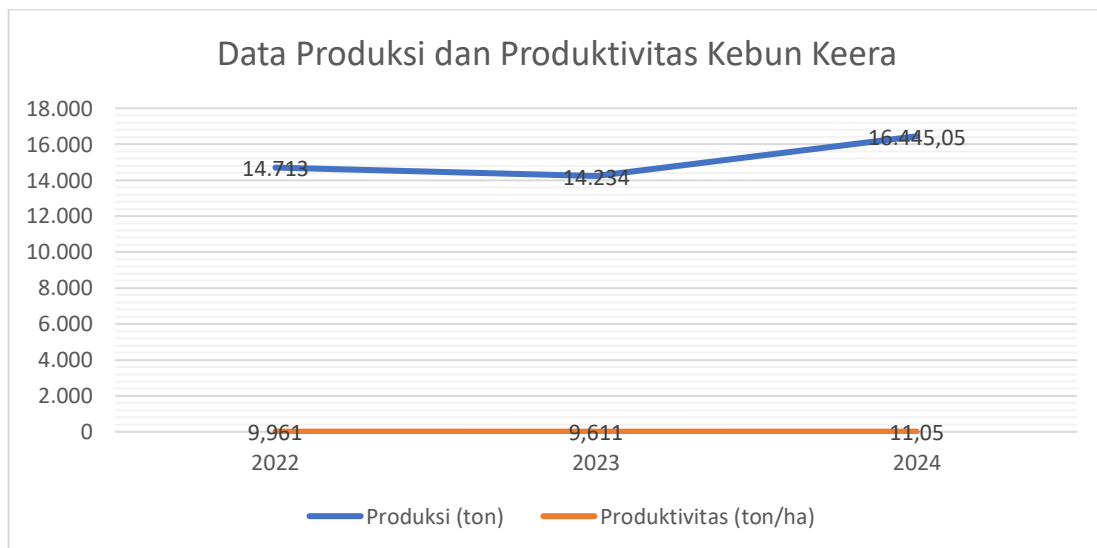


digunakan secara luas dalam penyelesaian permasalahan pengambilan kriteria, namun penerapannya masih sering menimbulkan kritik dari beberapa apa kelemahan AHP berikut ini (Chan, 2003):

1. Metode AHP hanya sering digunakan dalam pembuatan keputusan yang hampir pasti (*crisp*).
2. AHP menggunakan skala estimasi yang tidak seimbang.
3. AHP tidak mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian dalam perhitungannya, karena telah menganggap nilai kepentingan relatif cukup mewakili hal tersebut.
4. Peringkat dalam AHP tidak begitu presisi.
5. Penilaian yang subjektif, pemilihan dan preferensi dari pembuat keputusan akan membawa pengaruh yang besar.

2.1.6. Kebun Keera

Kebun Keera merupakan salah satu kebun yang masuk dalam manajemen unit Kebun Keera-Marosing, Kebun Keera merupakan salah satu kebun kelapa sawit Kerja Sama Operasional (KSO) Distrik Sulawesi Regional II PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) yang sebelumnya masuk dalam unit PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV), sebelum terjadi merger ke PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I) pada Desember 2023. Kebun Keera memiliki luas konsesi HGU 12.170 Ha dan luas areal yang tertanami sawit sebesar 3.453 Ha di tahun 2025. Produksi dalam 3 tahun terakhir periode 2022 s.d. 2024 relatif naik turun tiap tahunnya. Tahun 2024 produksi Tanda Buah Segar (TBS) Kebun Keera sebesar 16.445,05 ton dengan produktivitas 11,05 ton/ha (Keera, 2024 (Keera-Marosing K. , 2024).



Gambar 4. Data Produksi dan Produktivitas Kebun Keera

Sumber: Laporan Manajemen Kebun Keera



Manajemen Kebun Keera terdiri dari beberapa posisi kunci yang memastikan operasional dan manajemen kebun. Puncak struktur organisasi dipimpin oleh Kepala Kebun yang bertanggung jawab atas keseluruhan operasional kebun. Di bawahnya terdapat Asisten Kepala Tanaman Keera yang mengawasi perawatan dan

pengelolaan tanaman. Selain itu, terdapat Asisten Tata Usaha yang mengelola administrasi dan kegiatan operasional sehari-hari, serta Asisten Personalia dan Umum yang menangani sumber daya manusia dan kebutuhan umum lainnya. Struktur ini dirancang untuk memastikan setiap aspek operasional dan manajerial kebun dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Jumlah karyawan di Kebun Keera mencapai 110 orang dengan 83 orang PKWTT dan 27 orang karyawan PKWT (Keera-Marosing K. , 2024)

Kebun Keera merupakan salah satu rantai pasok TBS ke PKS Luwu yang saat ini telah memperoleh sertifikat RSPO sejak 2022, namun sampai sekarang CPO dari kebun keera belum dapat di klaim dalam produk bersertifikat RSPO karena kebun ini belum mendapatkan sertifikasi RSPO. Sebagai rantai pasok PKS yang telah bersertifikasi RSPO, Kebun Keera juga telah masuk dalam *timebound* sertifikasi RSPO dan harus memenuhi standar RSPO dalam proses produksinya.



Optimized using
trial version
www.balesio.com

2.2. Tinjauan Empiris

2.2.1. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilakukan mempunyai kaitan dengan beberapa penelitian terdahulu. Hasil dari penelitian terdahulu diperoleh sebagai berikut:

Penelitian mengenai strategi percepatan sertifikasi ISPO pada perkebunan Kelapa Sawit yang dilakukan oleh Hadi, dkk. (2023) menggunakan analisa SWOT dan AHP yaitu, bahwa percepatan sertifikasi ISPO di perkebunan kelapa sawit swadaya mendesak untuk dilakukan. Strategi prioritas untuk percepatan sertifikasi tersebut adalah mempercepat pelaksanaan program PSR, penguatan kelembagaan penyelenggaraan ISPO dan penyediaan tenaga pendamping sebagai pendukung kelembagaan penyelenggaraan ISPO. Strategi penguatan kelembagaan penyelenggaraan ISPO dan penyediaan tenaga pendamping lapangan dapat disinergikan dengan penguatan kelembagaan dan penyediaan pendamping PSR atau menjadi kelembagaan penyelenggaraan bersama PSR dan ISPO dengan memanfaatkan penampungan lapangan yang sama.

Menurut Analisa Hidayati, dkk (2024), mengenai analisis kinerja dan faktor keberhasilan implementasi sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2015 di PT. Elang Perdana Tyres Industry Kabupaten Bogor diperoleh hasil (1) kinerja implementasi SML ISO 14001:2015 memiliki rata-rata sebesar 71,35% dengan kategori sedang dengan kinerja implementasi SML ISO 14001:2015 paling tinggi pada elemen evaluasi kinerja sebesar 92% dan kinerja implementasi SML ISO 14001:2015 paling rendah terdapat pada elemen konteks organisasi sebesar 50%, (2) tiga faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan implementasi SML ISO 14001:2015 di PT. Elang Perdana Tyres Industry adalah perusahaan mengendalikan kegiatan dalam organisasi untuk memenuhi persyaratan SML, perusahaan menjamin informasi dokumentasi telah dilaksanakan dan ketidaksesuaian lingkungan dari pihak luar organisasi yang memberikan dampak merugikan, (3) persepsi responden akan manfaat dalam implementasi SML ISO 14001:2015 yang paling besar adalah dapat meningkatkan citra perusahaan (93%) sedangkan persepsi responden akan manfaat dalam implementasi SML ISO 1400:2015 paling rendah adalah meningkatkan motivasi kerja karyawan perusahaan (72%), (4) strategi perbaikan penerapan SML ISO 14001:2015 di PT. Elang Perdana Tyres Industry, diambil dari 3 (tiga) analisis strategi



urutan teratas, yaitu melakukan peninjauan berkala terhadap kebijakan, visi, dan misi perusahaan untuk mendukung sasaran lingkungan serta ses perusahaan, meningkatkan tindakan perbaikan atas ketidaksesuaian isi dampak lingkungan serta meningkatkan sosialisasi penerapan SML pihak yang berkepentingan.

Menurut analisa Usapein, dkk. (2022), mengenai struktur penelitian kelapa sawit menuju model ekonomi hijau biosirkular dengan menggunakan SWOT diperoleh hasil bahwa dari berbagai masalah yang ada timbul beberapa ide dan penanggulangan untuk masalah pada pasar dan peraturan untuk mempromosikan perkembangan minyak kelapa sawit. RSPO merupakan organisasi nirlaba yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan kelapa sawit berkelanjutan. Strategi berdasarkan struktur penelitian pada minyak kelapa sawit diperoleh 4 kategori. Pertama yaitu peraturan mengenai manajemen kelapa wait, perkembangan dan berbagai instrumen ekonomi yang mempengaruhi industri kelapa sawit. Kedua adalah perkebang-biakan & teknologi produksi kelapa sawit, mengembangkan inovasi yang sejalan dengan kehidupan pekebun, dan mendukung penelitian pada analisa kandungan minyak sawit serta teknologi panen. Ketiga yaitu, teknologi konversi biomassa kelapa sawit, menaksir dampak pada lingkungan dengan menggunakan teknologi siklus hidup, mengevaluasi potensi pengurangan emisi GHG (*Greenhouse Gas*) dan peningkatan konsumsi biomassa kelapa sawit. Keempat adalah mengembangkan kelapa sawit dengan teknologi berbasis industri oleochemical, yang menghasilkan produk minyak kelapa sawit berbasis oleochemical dan meningkatkan tingkat konsumsi dengan nilai CPO. Mendukung program kelapa sawit berkelanjutan dapat mengurangi deforestasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Febriana, dkk. (2022), pada pemanfaatan limbah pabrik minyak kelapa sawit untuk meningkatkan kualitas tanah dan produktivitas tanaman kelapa sawit menggunakan analisis SWOT yang didasarkan hasil analisis POME (*Palm Oil Mill Effluent*) pada limbah minyak kelapa sawit diperoleh hasil yang menunjukkan bahwa perlu meningkatkan kandungan fisik dan kimia tanah secara optimal perlu dilakukan pemeriksaan kembali pada limbah kelapa sawit, sehingga mendapatkan nilai yang tepat untuk tanah dan penanaman kelapa sawit. Mempunyai manajemen POME yang berkualitas untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan dan memiliki rencana cadangan untuk mengontrol pembuangan limbah yang berlebihan di jalur air. Sehingga, perlu adanya pemeriksaan limbah cair secara berkala.

Menurut penelitian yang telah dilakukan Shadiq, dkk. (2023) mengenai strategi penerapan K3 dengan menggunakan analisis SWOT dan AHP, diperoleh hasil bahwa strategi yang tepat untuk diterapkan adalah strategi intensif yaitu strategi dengan K3 (OHS system development) dan strategi integrasi yaitu strategi orisontal sistem K3 (OHS system horizontal integration).



Penelitian untuk Membawa Transformasi dalam Industri Minyak Sawit dan Rantai Pasok yang dilakukan oleh Aljoghaiman & Sundram (2023), menggunakan analisis SWOT memperoleh hasil bahwa Malaysia memiliki

kondisi yang menguntungkan dan pasokan rantai yang efisien yang memberikan dukungan status sebagai produsen utama minyak sawit. Karakteristik ini dapat dianggap sebagai keuntungan yang signifikan bagi negara. Namun, dampak lingkungan dari industri ini telah memunculkan kritik, menimbulkan tantangan bagi keberlanjutan, dan mengarah pada penerapan regulasi yang lebih ketat, sehingga menjadi kelemahan yang mencolok. Peluang yang paling dihargai adalah promosi minyak sawit berkelanjutan bersertifikat untuk memenuhi tuntutan keberlanjutan global yang terus berkembang. Sebaliknya, tantangan utama yang dihadapi oleh industri ini berkaitan dengan aksesibilitas minyak sawit yang terbatas akibat regulasi yang semakin ketat, yang secara khusus mempengaruhi produsen Malaysia. Menurut analisis QSPM, memprioritaskan aktivasi infrastruktur yang ada muncul sebagai strategi yang paling penting. Temuan ini menekankan pentingnya memanfaatkan praktik yang berkelanjutan melalui infrastruktur yang sudah mapan dan teknologi modern untuk meningkatkan daya saing industri.

Menurut Pratiwi dan Gunarto (2021), optimalisasi dalam implementasi ISO 9001:2015 menggunakan SWOT dan QSPM (Quantitative Strategic Planning Matrix), menunjukkan bahwa diperlukan strategi untuk berkembang. Berdasarkan analisis SWOT, terdapat beberapa strategi alternatif untuk mengoptimalkan proses implementasi ISO 9001:2015. Kemudian, strategi terbaik diperoleh berdasarkan hasil analisis QSPM, yaitu dengan meningkatkan kompetensi dan pelatihan karyawan.

Hasil analisa SWOT pada implentasi sistem manajemen kualitas ISO 9001 yang dilakukan oleh Witara, dkk. (2023), menunjukkan bahwa diperlukan sumberdaya manusia yang memiliki keahlian yang memadai, sehingga perlu adanya implementasi manajemen kontrol yang akan menunjang kualitas para pekerja. Melakukan implementasi ISO 9001 merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualtias pelayanan masyarakat dan keberlanjutan. Meskipun terdapat beberapa tantangan, keuntungan jangka panjang yang akan diperoleh dapat mengatasi tantangan tersebut selama seluruh *stakeholders*, seperti pemerintah dan warga sekitar yang terlibat mau bekerja sama untuk menggapai tujuan bersama.

Hasil analisa pada pasokan rantai minyak kelapa sawit yang dilakukan oleh Pramana, dkk. (2022), menunjukkan bahwa pekebun, pedagang, dan perusahaan merupakan bagian dari alur pasokan rantai minyak kelapa sawit. Untuk meningkatkan



PO diperoleh hasil analisa menggunakan AHP yaitu perusahaan perlu kan fasilitas dan infrastruktur.

Menurut hasil analisa Pangabea, dkk. (2023) dengan menggunakan SWOT kan bahwa pekebun yang merasa puas dengan hasil yang diperoleh n faktor utama yang menyebabkan keterlambatan peremajaan perkebunan

kelapa sawit. Faktor lainnya adalah biaya untuk peremajaan kelapa sawit cukup tinggi, sedangkan pekerjaan di kebun sawit merupakan pekerjaan sampingan. Strategi yang dapat diterapkan dari hasil AHP yaitu, KUD menaungi pekebun, kemudian melakukan program peremajaan kelapa sawit secara bersama.

Hasil penelitian Mauliddina dan Susanty (2016), faktor sukses pada implementasi ISO 14001 dengan metode AHP yaitu aspek teknis dan pendekatan manajemen. Strategi yang dapat dirancang berdasarkan kedua aspek tersebut adalah dengan memperhatikan seluruh tiap bagian dari aspek tersebut. Contoh pada lingkungan perusahaan yaitu, adanya pemantauan dan pengukuran untuk memastikan bahwa kegiatan proses produksi di lingkungan tidak melewati nilai ambang batas

NO	Nama	Variabel	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Syaiful Hadi, Djaimi Bakce, Didi Muwardi, Jum'arti Yusri, & Fanny Septya (2023)	Faktor SWOT (kekuatan: dukungan lembaga, program PSR, dll; kelemahan: akses informasi, biaya tinggi, dll); Strategi percepatan sertifikasi ISPO (output strategi)	<i>Analysis Strength, Weakness, Opportunity, & Threat</i> dan <i>Analytical Hierarchy Process</i>	Strategi prioritas untuk percepatan sertifikasi tersebut adalah mempercepat pelaksanaan program PSR, penguatan kelembagaan penyelenggaraan ISPO dan penyediaan tenaga pendamping sebagai pendukung kelembagaan penyelenggaraan ISPO
2	Ruti Nurul Hidayati, Sodikin, Nurhasanah (2024)	Faktor-faktor keberhasilan (pengendalian dokumen, pengendalian kegiatan, ketidaksesuaian eksternal); Kinerja implementasi ISO 14001:2015	<i>Analysis Strength, Weakness, Opportunity, & Threat</i> dan <i>Analytical Hierarchy Process</i>	Kinerja implementasi SML ISO 14001:2015 memiliki rata-rata sebesar 71,35% dan tiga faktor yang paling mempengaruhi keberhasilan implementasi SML ISO 14001:2015 di PT. Elang Perdana Tyres Industry adalah perusahaan mengendalikan kegiatan dalam organisasi untuk memenuhi persyaratan SML, perusahaan menjamin informasi dokumentasi telah dilaksanakan dan ketidaksesuaian lingkungan



				dari pihak luar organisasi yang memberikan dampak merugikan,
3	Parnuwat Usapein, Nattapong Tuntiwiwattanapun, Pirapan Polburee, Prakan Veerakul, Chaiyaporn Seekao, Orathai Chavalparit (2022)	Faktor SWOT: S, W, O, T. kebijakan manajemen sawit, teknologi biomassa, dan produk oleokimia	Analysis Strength, Weakness, Opportunity, & Threat	Pertama yaitu peraturan mengenai manajemen kelapa sawit, perkembangan dan berbagai instrumen ekonomi yang mempengaruhi industri kelapa sawit. Kedua adalah berkembang-biakan & teknologi produksi kelapa sawit, mengembangkan inovasi yang sejalan dengan kehidupan pekebun, dan mendukung penelitian pada analisa kandungan minyak sawit serta teknologi panen. Ketiga yaitu, teknologi konversi biomassa kelapa sawit, menaksir dampak pada lingkungan dengan menggunakan teknologi siklus hidup, mengevaluasi potensi pengurangan emisi GHG (Greenhouse Gas) dan peningkatan konsumsi biomassa kelapa sawit. Keempat adalah mengembangkan kelapa sawit dengan teknologi berbasis industri oleochemical, yang menghasilkan produk minyak kelapa sawit berbasis oleochemical dan meningkatkan tingkat konsumsi dengan nilai CPO.



				Mendukung program kelapa sawit berkelanjutan dapat mengurangi deforestasi.
4	Dela Febriana, Sylvia Madusari and Vira Irma Sari. (2022).	Penggunaan POME, Kondisi fisik dan kimia tanah, dan produktivitas tanaman	Analysis Strength, Weakness, Opportunity, & Threat	Perlu dilakukan pemeriksaan kembali pada limbah kelapa sawit, sehingga mendapatkan nilai yang tepat untuk tanah dan penanaman kelapa sawit. Mempunyai manajemen POME yang berkualitas untuk mengantisipasi jika terjadi perubahan dan memiliki rencana cadangan untuk mengontrol pembuangan limbah yang berlebihan di jalur air. Sehingga, perlu adanya pemeriksaan limbah cair secara berkala.
5	Jafar Shadiq, Tatan Sukwika, Iman Basriman. (2023).		Analysis Strength, Weakness, Opportunity, & Threat	Strategi intensif yaitu strategi pengembangan K3 (OHS system development) dan strategi integrasi yaitu strategi integrasi horisontal sistem K3 (OHS system horizontal integration).
6	Abdulaziz Aljoghaiman & Veera Pandiyan Kaliani Sundram (2023).	Faktor internal: efisiensi, kebijakan, diversifikasi, infrastruktur, R&D; Faktor eksternal: regulasi, permintaan global, teknologi, kolaborasi	Analysis Strength, Weakness, Opportunity, & Threat dan Quantitative Strategic Planning Matrix	Analisis SWOT menunjukkan hasil bahwa Malaysia memiliki kondisi yang menguntungkan dan pasokan rantai yang efisien yang memberikan dukungan status sebagai produsen utama minyak sawit. Karakteristik ini dapat dianggap sebagai keuntungan yang signifikan bagi negara.



				Namun, dampak lingkungan dari industri ini telah memunculkan kritik, menimbulkan tantangan bagi keberlanjutan, dan mengarah pada penerapan regulasi yang lebih ketat, sehingga menjadi kelemahan yang mencolok. Peluang yang paling dihargai adalah promosi minyak sawit berkelanjutan bersertifikat untuk memenuhi tuntutan keberlanjutan global yang terus berkembang. Sebaliknya, tantangan utama yang dihadapi oleh industri ini berkaitan dengan aksesibilitas minyak sawit yang terbatas akibat regulasi yang semakin ketat, yang secara khusus mempengaruhi produsen Malaysia. Menurut analisis QSPM, memprioritaskan aktivasi infrastruktur yang ada muncul sebagai strategi yang paling penting. Temuan ini menekankan pentingnya memanfaatkan praktik yang berkelanjutan melalui infrastruktur yang sudah mapan dan teknologi modern untuk meningkatkan daya saing industri.
	tri Pratiwi Sunarto 21)		Analysis Strength, Weakness, Opportunity,	Berdasarkan analisis SWOT, terdapat beberapa strategi alternatif untuk

			& Threat dan Quantitative Strategic Planning Matrix	mengoptimalkan proses implementasi ISO 9001:2015. Kemudian, strategi terbaik diperoleh berdasarkan hasil analisis QSPM, yaitu dengan meningkatkan kompetensi dan pelatihan karyawan.
8	Ketut Witara, Laksmi Murni Kurniasari & Dodit Cahyo Nugroho. (2023)		Analysis Strength, Weakness, Opportunity, & Threat	Implementasi manajemen kontrol yang akan menunjang kualitas para pekerja. Melakukan implementasi ISO 9001 merupakan langkah penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat dan keberlanjutan. Meskipun terdapat beberapa tantangan, keuntungan jangka panjang yang akan diperoleh dapat mengatasi tantangan tersebut selama seluruh <i>stakeholders</i> , seperti pemerintah dan warga sekitar yang terlibat mau bekerja sama untuk menggapai tujuan bersama.
9	Angga Pramana, Yelly Zamaya, Arum Novianti Ningsih, Farida Hanum Hamzah, Yelmira Zalfiatri, Dihan Kurnia, Rahmayuni, & Nita Rimayanti	Strategi manajemen rantai pasok; Faktor SWOT sebagai dimensi analisis	Analysis Strength, Weakness, Opportunity, & Threat dan Analytical Hierarchy Process	Pekebun, pedagang, dan perusahaan merupakan bagian dari alur pasokan rantai minyak kelapa sawit. Untuk meningkatkan kualitas CPO diperoleh hasil analisa menggunakan AHP yaitu perusahaan perlu meningkatkan fasilitas dan infrastruktur.



10	Brilliant Thesalonich Panggabean, Sakti Hutabarat, & Didi Muwardi (2023)	Faktor keterlambatan peremajaan dan Strategi peremajaan sawit	<i>Analysis Strength, Weakness, Opportunity, & Threat</i> Dan <i>Analytical Hierarchy Process</i>	Faktor utama yang menyebabkan keterlambatan peremajaan perkebunan kelapa sawit. Faktor lainnya adalah biaya untuk peremajaan kelapa sawit cukup tinggi, sedangkan pekerjaan di kebun sawit merupakan pekerjaan sampingan. Strategi yang dapat diterapkan dari hasil AHP yaitu, KUD menaungi pekebun, kemudian melakukan program peremajaan kelapa sawit secara bersama.
11	Yasmin Mauliddina dan Aries Susanty (2016)	Faktor-faktor internal implementasi ISO 14001: Komitmen manajemen, Kompetensi SDM, Dukungan operasional	<i>Analytical Hierarchy Process</i> dan Delphi	Strategi yang dapat dirancang berdasarkan aspek teknis dan pendekatan manajemen adalah dengan memperhatikan seluruh tiap bagian dari aspek tersebut. Contoh pada lingkungan perusahaan yaitu, adanya pemantauan dan pengukuran untuk memastikan bahwa kegiatan proses produksi di lingkungan tidak melewati nilai ambang batas

